

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PAPUA**



Oleh:

Nama : Sekar Ayu Nindita

Nomor Mahasiswa : 20313121

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2024

**Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi
Kalimantan Timur Dan Papua**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Sekar Ayu Nindita

Nomor Mahasiswa : 20313121

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Penulis,



Sekar Ayu Nindita

PENGESAHAN

Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan
Timur dan Papua

Oleh:

Nama : Sekar Ayu Nindita

Nomor Mahasiswa : 20313121

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua

Disusun oleh : SEKAR AYU NINDITA

Nomor Mahasiswa : 20313121

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 28 Maret 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Prastowo, SE.,M.Ec.Dev.

.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

“Tidak ada istilah diam atau santai bagi orang yang memiliki akal dan adab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantauilah.

Merantauilah, niscaya akan kau dapatkan pengganti bagi orang yang kau tinggalkan. Berusahalah, karena nikmatnya hidup itu ada dalam usaha.”

“Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan.”

(Imam Syafi’i)

“Jika kamu tidak keluar dari tempatmu dibesarkan, kamu tidak akan mengerti seberapa besar dunia ini”

Angelina Jolie

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridho, rahmat, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu dan target yang telah disusun oleh penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, kakak dan adik penulis yang tak henti-hentinya selalu memberikan dorongan, kekuatan, doa, dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi ini dan mempersiapkan masa depan yang baik dengan bekal ilmu dan kemampuan yg telah penulis dapatkan selama ini.

Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan dari keluarga besar penulis, bapak dan ibu dosen, serta teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua” sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya pada Hari Akhir.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tak lepas dari doa, bimbingan, nasehat, dan bantuannya dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan.
3. Seluruh bapak/ibu dosen Program studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Donny Kristanto Mulyantoro dan Ibu Anjar Triastuti, serta kakak dan adik penulis Muhammad Fadil Bagas Darmawan dan Muhammad Ghatfan Firdaus yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman penulis Muhammad Ragil Santoso, Sekar Arum Satya Kamila, Ramihafsari Ayuningtyas, Destira Nila Paramasiwi, Khairunnisa Tongato, Aminatus Zuhriya, dan Maulida Tsania Taufiqurrohman yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berharap sarn, kritik dan masukan yang membangun untuk pembelajaran bagi penulis maupun pembaca umum. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umum penulis sendiri maupun pembaca umum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis,

Sekar Ayu Nindita

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
2.2.2. Pengeluaran Pemerintah	14
2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi	18
2.3. Kerangka Pemikiran	19
2.4. Hipotesis Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	20
3.2. Variabel Operasional	20
3.2.1. Variabel Dependen (Y)	20
3.2.2. Variabel Independen (X)	21
3.3. Metode Analisis.....	21

3.3.1. <i>Common effect Model</i>	22
3.3.2. <i>Fixed Effect Model</i>	22
3.3.3. <i>Random Effect Model</i>	23
3.4. Pemilihan Uji Pada Estimasi Regresi	23
3.4.1. Uji Chow	23
3.4.2. Uji Hausman.....	23
3.4.3. Uji Lagrange Multiplier	24
3.5. Uji Statistik.....	24
3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	24
3.5.2. Uji Parsial (t Statistik)	24
3.5.3. Uji Simultan (F Statistik).....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1. Deskripsi Data Penelitian	26
4.2. Hasil Pengolahan Data.....	29
4.2.1. Hasil Regresi.....	29
4.2.1.1. <i>Common Effect Model</i>	29
4.2.1.2. <i>Fixed Effect Model</i>	30
4.2.1.3. <i>Random Effect Model</i>	31
4.2.2. Pemilihan Model Terbaik	31
4.2.2.1. Uji Chow.....	31
4.2.2.2. Uji Lagrange Multiplier.....	32
4.2.2.3. Uji Hausman	32
4.2.3. Hasil Uji Statistik.....	33
4.2.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)	34
4.2.3.2. Uji Simultan (F statistik)	35
4.2.3.3. Uji Parsial (t Statistik).....	36
4.2.4. Interpretasi Hasil.....	37
4.2.4.1. Hasil Analisis Kabupaten/Kota	39
4.3. Pembahasan	49
4.3.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	49

4.3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	51
4.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	51
4.3.4. Perbandingan Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua	52
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	54
5.1. Simpulan.....	54
5.2. Implikasi.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Deskripsi Data di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022.....	27
Tabel 4.2	Deskripsi Data di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2016-2022.....	28
Tabel 4.3	<i>Common Effect Model</i> Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.....	30
Tabel 4.4	<i>Fixed Effect Model</i> Provinsi Kalimantan Timur dan Papua	30
Tabel 4.5	<i>Random Effect Model</i> Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.....	31
Tabel 4.6	Hasil Uji Chow	31
Tabel 4.7	Hasil Uji Lagrange Multiplier	32
Tabel 4.8	Hasil Uji Hausman.....	33
Tabel 4.9	Hasil Regresi Data Panel Model Terbaik Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.....	34
Tabel 4.10	<i>Cross Effect</i> Provinsi Kalimantan Timur	39
Tabel 4.11	<i>Cross Effect</i> Provinsi Papua	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2022	2
Gambar 1.2	Rata-Rata IPM 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2022.....	3
Gambar 1.3	IPM di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Tahun 2015-2022.....	4
Gambar 1.4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Indonesia Tahun 2022.....	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	60
Lampiran 2	73

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian suatu negara. Tiga hal penting yang digunakan untuk mengukur IPM adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM di setiap provinsi Indonesia masih belum merata. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya daerah yang memiliki IPM jauh di bawah rata-rata IPM Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, Provinsi Papua memiliki IPM terendah, jauh dengan rata-rata IPM nasional. Perlu adanya strategi untuk pemerataan pembangunan manusia di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel dengan penggunaan data *time series* dan *cross section* di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua. Faktor pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan, faktor pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, faktor pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua, namun pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap IPM.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi.

BAB I

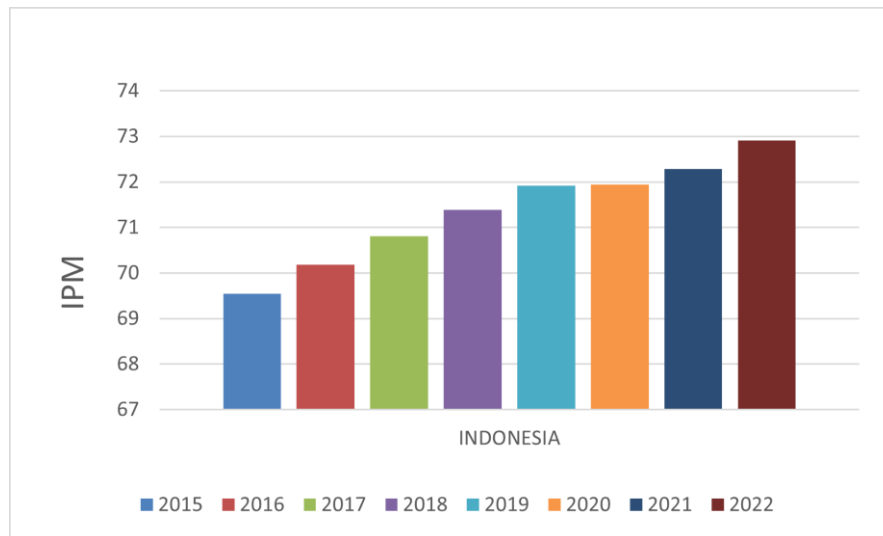
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara adalah dengan mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui keberhasilan dari pengukuran IPM disuatu daerah, perlu dilakukan penelitian. Adanya penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat melakukan pemantauan mengenai kemajuan pembangunan, kesejahteraan, perbandingan antar provinsi bahkan negara, serta dapat menganalisis ketidaksetaraan suatu daerah terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Unsur yang digunakan dalam IPM diantaranya seperti kesehatan, pendidikan, standar kehidupan atau ekonomi. Apabila tiga unsur dalam IPM dapat ditingkatkan, maka akan berbanding lurus dengan kenaikan IPM. Untuk mengukur indeks kesehatan, dapat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Indeks pendidikan dapat diukur menggunakan gabungan antara rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Sementara itu, indeks kehidupan yang layak dapat diukur dengan indikasi daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar. Indeks ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang memiliki indikasi pencapaian pembangunan untuk kehidupan yang layak. (BPS, 2023)

Dalam undang-undang No. 221/2001 tentang otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan jenis pembangunan yang diinginkan oleh konstituennya. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dikelola oleh DAU, DAK, dan PAD. Melalui anggaran APBD pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan menggunakan pendapatan untuk mendanai pengeluaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, terutama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

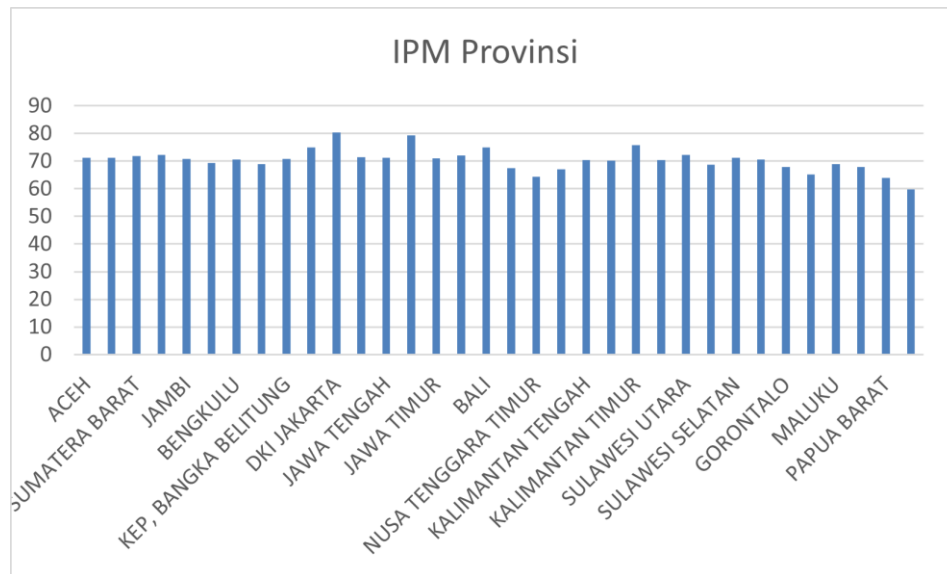


Sumber : www.bps.go.id

Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia DI Indonesia Tahun 2015-2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 0,63, tahun 2017 meningkat sebesar 0.65, tahun 2018 meningkat sebesar 0.58, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0.53, tahun 2020 meningkat sebesar 0.02, tahun 2021 meningkat sebesar 0.35, dan pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar 0.62. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia hanya mengalami kenaikan sebesar 0.02. Nilai ini merupakan kenaikan terendah selama 8 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan roda perekonomian Indonesia dan dunia terganggu.

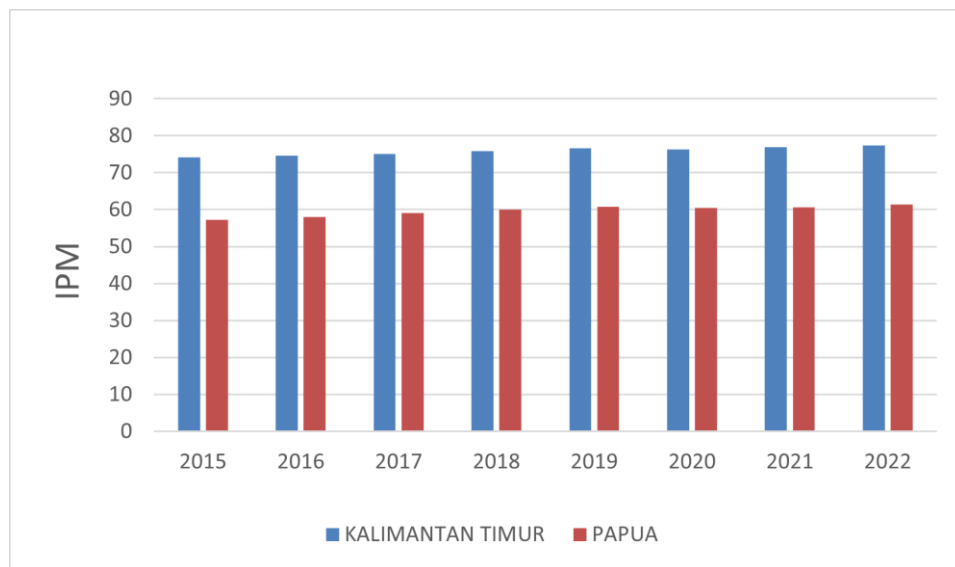


Sumber : www.bps.go.id

Gambar 1.2

Rata-rata IPM 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2022

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia belum merata. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase sebesar 80.42, Yogyakarta sebesar 79.40, dan Kalimantan Timur sebesar 75.86. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia paling rendah ada di Provinsi Papua dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 59.71. Hal utama yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena adanya kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta standar hidup layak yang dimiliki oleh masyarakat.



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 1.3

IPM di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Tahun 2015-2022

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Timur dan Papua memiliki selisih Indeks Pembangunan Manusia lebih dari 10%. Provinsi Kalimantan Timur sendiri memiliki 10 kabupaten/Kota dengan luas daerah sebesar 127.346 km² dan jumlah penduduk sebanyak 4.007.736 jiwa pada akhir tahun 2023. Sedangkan, Provinsi Papua memiliki 29 Kabupaten/Kota dengan luas daerah sebesar 82.681 km² dan jumlah penduduk sebanyak 4,3 juta jiwa.

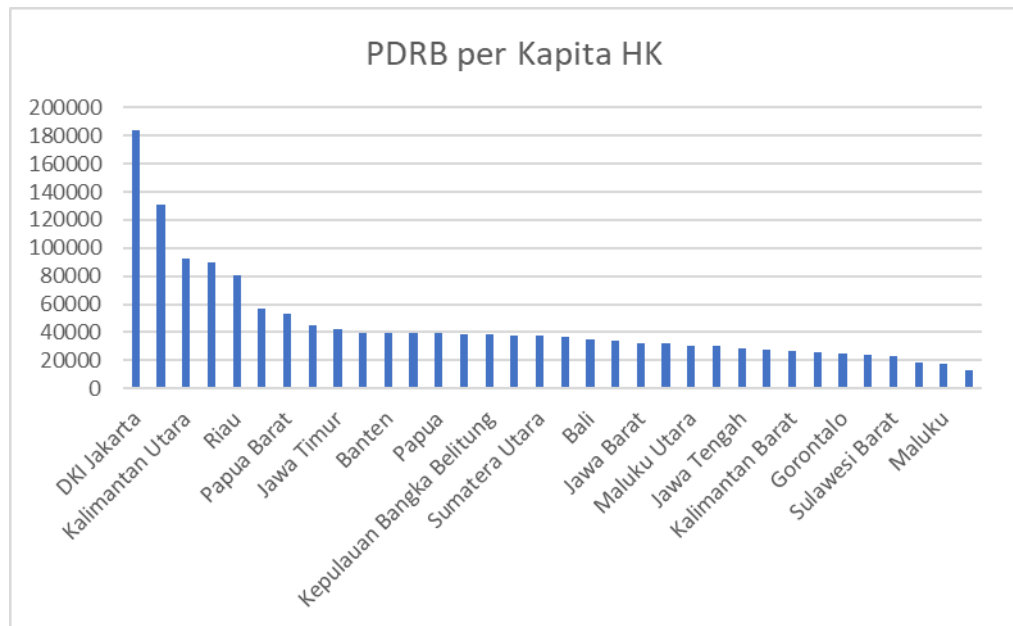
Susanti & Hidayat (2020) mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Faktor yang menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya adalah faktor kesehatan yang dilihat dari indikator angka harapan hidup, faktor pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta faktor ekonomi masyarakat yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan kontribusi perekonomian sebesar 50%. Tingginya kontribusi perekonomian di Pulau Kalimantan tidak sejalan dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dengan mobilitas yang ada di daerah masih terbatas.

Kacaribu & Rindayati (2013) mengatakan bahwa Provinsi Papua memiliki IPM paling rendah di antara provinsi-provinsi lain. Hal ini dapat diakibatkan karena kurangnya tindakan pemerintah di Provinsi Papua untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pada tiga bidang yang mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun demikian, Provinsi Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, provinsi Papua seharusnya dapat bersaing dengan provinsi lain untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna meningkatkan kemungkinan pendapatan yang lebih besar di kemudian hari. Peningkatan pendapatan akan mengarah kepada peningkatan konsumsi di kemudian hari. Pengembangan sumber daya manusia mengarah pada pembangunan manusia. Sementara itu, peningkatan modal manusia tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kinerja ekonomi. Dengan kata lain, ada korelasi langsung antara ekonomi dan pengaruh terhadap pembangunan manusia. Sebaliknya, akibat dari perbaikan kualitas manusia akan meningkatkan perekonomian dalam jangka panjang. (Munawwaroh, 2013)

Pengeluaran pemerintah menunjukkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat saat pemerintah menetapkan suatu kebijakan dengan memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Komitmen pemerintah dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan terhadap permasalahan suatu bidang, seperti dalam bidang pendidikan (Mangkoesebroto, 2001)



Sumber : webapi.bps.go.id

Gambar 1.4

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Indonesia Tahun 2022

Gambar 1.4 menunjukkan perbedaan PDRB per kapita menurut harga konstan di Indonesia tahun 2022. DKI Jakarta memiliki nilai PDRB perkapita tertinggi dengan nilai sebesar Rp. 183.589,00, disusul oleh Kalimantan Timur dengan nilai Rp. 131.239,00 dan Kalimantan Utara sebesar Rp. 92.393,00. Kemudian, provinsi dengan nilai PDRB per kapita menurut harga konstan terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar Rp 18.647,00, Provinsi Maluku sebesar Rp. 17.717,00 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 13.264,00. Provinsi Papua sendiri berada di urutan 13 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp. 39.113,00.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak meratanya PDRB di suatu wilayah seperti, ketersediaan sumber daya alam dengan pengelolaannya, kemajuan teknologi, infrastruktur yang memadai, dan lain sebagainya. Pada gambar 1.4, sangat terlihat bahwa PDRB per kapita di Indonesia belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah daerah dengan PDRB per kapita di bawah rata-rata pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata nasional. Rata-rata PDRB per kapita

pada tahun 2022 sebesar Rp. 45.540,00. Dari 34 provinsi, hanya 8 provinsi yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata nasional, sedangkan 26 provinsi lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata nasional. Provinsi Papua termasuk dalam provinsi yang memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata nasional. Selisih dari PDRB per kapita di Provinsi Papua dan Kalimantan timur sebesar Rp 92.126,00, yang menunjukkan bahwa selisih ini sangat jauh perbedaannya.

Saat ini Provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan pembangunan manusia dan kondisi perekonomian terendah di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pada sektor pertambangan dan kehutanan. Kekayaan alam yang ada di Papua sering kali tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua secara merata seperti pada sektor pertambangan yang merupakan salah satu proyek ekstraktif dengan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan asing namun manfaat dari hasil tambang tidak sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Papua. (Alfianty & Prasetya, 2019)

Tantangan lain yang dihadapi oleh Papua dalam menghadapi pembangunan manusia dan perekonomian yang rendah adalah kesediaan pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat terutama pada wilayah pedalaman. Apabila infrastruktur dasar pada suatu wilayah tidak terpenuhi, maka dapat memberikan dampak terhadap produktivitas ekonomi, terlebih pada akses terhadap pasar dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Soslaiwati, dkk, 2017)

Hal berbeda ditunjukkan pada kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi setelah DKI Jakarta. Laporan kinerja pemprov Kaltim (2021) menyatakan bahwa tingginya perekonomian di Kalimantan Timur dapat disebabkan karena adanya kekayaan sumber daya alam terutama pada pertambangan minyak bumi, gas alam dan batu bara yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kalimantan Timur. Peningkatan PDRB tidak lepas dari kontribusi pada sektor pertambangan terhadap produksi ekonomi regional. Selain itu, investasi terhadap sektor

pertambangan, energi dan industri memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tingginya tingkat perekonomian di Kalimantan Timur tidak hanya didapatkan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan investasi pada sektor-sektor kunci seperti pertambangan dan industri, namun Kalimantan Timur juga mengembangkan sektor-sektor non pertambangan seperti perdagangan, pengolahan, dan jasa. Dalam kata lain bahwa Kalimantan Timur telah melakukan diversifikasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Selain itu juga, ketersediaan infrastruktur yang baik termasuk pada jaringan transportasi yang baik seperti adanya pelabuhan dan fasilitas energi dapat mendukung konektivitas antar sektor ekonomi. Pemerintah daerah juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, dan juga pelabuhan untuk mobilitas ekonomi guna peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Wulandari, 2023)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari penjelasan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua?
4. Bagaimana perbandingan faktor yang menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dan Provinsi Papua memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua
4. Menganalisis perbandingan faktor yang menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dan Provinsi Papua memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan baru dan mengembangkan wawasan mengenai perkembangan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari perspektif ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur penulis dalam memenuhi syarat tugas akhir skripsi.

2. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dapat menjadi salah satu rujukan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan manusia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu. Kesamaan variabel dependen dan independen, tujuan penelitian, teknik analisis, dan temuan penelitian yang akan digunakan sebagai referensi penelitian sebelumnya yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian terdahulu.

Maulana & Bowo (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Apabila pertumbuhan ekonomi dan pendidikan mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga naik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mongan (2019) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah harus menjaga dan meningkatkan pelayanan terhadap akses pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kesehatan masyarakat dapat didukung dengan meningkatkan alokasi dana kesehatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Harapan hidup saat lahir sebesar 69,89 persen pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 70,89 persen pada tahun 2015 yang menunjukkan adanya perbaikan pada bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap indeks kesehatan yang ditunjukkan dengan hasil estimasi. Peningkatan angka harapan hidup dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi yang didorong dengan pengeluaran belanja pemerintah pada sektor kesehatan. (Fadilah, dkk, 2018)

Adanya peningkatan pertumbuhan manusia dapat mempengaruhi ekonomi, begitu pula sebaliknya. Kemajuan pembangunan manusia dapat disebabkan karena ketersediaan sumber daya, produktivitas, tingkat pendidikan, ketersediaan infrastruktur, dan juga efektifitas kebijakan pemerintah daerah. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu contoh dengan keberhasilan pembangunan yang tak lepas dari peran pemerintah pusat sejak orde lama. Di sisi lain, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi namun memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. (Ezkirianto & Alexandi, 2018)

Palayukan, (2019) menjelaskan tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, studi kasus Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana yang cukup untuk pendidikan dapat memberikan fasilitas terhadap penyediaan infrastruktur, serta pelaksanaan inisiatif pendidikan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggaran yang cukup untuk bidang kesehatan dapat dialokasikan untuk penyediaan layanan infrastruktur, kesehatan dasar, serta pelaksanaan program kesehatan lainnya.

Anantika & Sasana (2020) menjelaskan dalam analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara APEC menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara APEC. Pada bidang pendidikan, masalah tersebut bisa terjadi karena pengeluaran pemerintah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh kemajuan ekonomi yang dicapai oleh anggota APEC tidak terkonsentrasi pada standar hidup masyarakat, melainkan tersebar secara tidak merata. Variabel lain seperti pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup nasional.

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Mononimbar (2022) menyatakan bahwa pengaruh secara signifikan terjadi pada pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa. Saat terjadi Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2010-2019 mengalami peningkatan yang stabil. Hal ini yang menjadikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Chaironi & Aji Prakoso (2022) dalam penelitiannya tentang faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kualitas pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat pendidikan yang baik, akan memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akan menjadikan sektor pendidikan yang lemah. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran rumah tangga yang menurun, selaras dengan pembangunan manusia juga akan menurun. Sebaliknya, apabila pengeluaran rumah tangga mengalami kenaikan, maka pembangunan manusia juga akan mengalami peningkatan.

Irwan & Akbar (2022) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif akibat adanya pandemi Covid-19.

Adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ditunjukkan dengan banyaknya orang yang dapat bersekolah dan memperoleh informasi yang baik seiring dengan meningkatnya dana anggaran pada pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena peningkatan anggaran pada bidang kesehatan akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan

fasilitas kesehatan yang memadai dan juga distribusi kesehatan yang sampai ke daerah terpencil. (Febrianto & Esther, 2023)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nation Development Programme (UNDP) memperkenalkan gagasan “Pembangunan Manusia” (*Human Development*) sebagai paradigma baru mengenai pembangunan dalam “Laporan Pembangunan Manusia Global” (*Global Human Development*) yang diterbitkan pada tahun 1990. Pembangunan manusia juga dapat ditujukan untuk peningkatan kualitas manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan keterampilan dengan penerapan dan penggunaan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. UNDP menyatakan dalam *Human Development Report* (HDR) pada tahun 1995 bahwa gagasan pembangunan manusia dibentuk dari empat aspek yang berhubungan untuk menjamin tercapainya tujuan dari pembangunan manusia. Empat aspek tersebut adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Beberapa aspek kualitas hidup digunakan oleh Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia. IPM merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dengan menggunakan metodologi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan. Mengukur indeks pendidikan dapat digunakan indikator rata-rata jumlah tahun sekolah dan tingkat melek huruf. Adapun indikator kemampuan daya beli dapat digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. (BPS, 2023)

Menghitung Indeks Pembangunan Manusia, perlu menghitung indeks setiap komponen yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks standar hidup layak. Rumus yang digunakan untuk menghitung masing-masing komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X = \frac{X(i) - X(i \text{ min})}{X(i \text{ maks}) - X(i \text{ min})}$$

$X(i)$	= Indeks Komponen
$X(i \text{ min})$	= Nilai minimum X_i
$X(i \text{ maks})$	= Nilai Maksimum X_i

Setelah ditemukannya hasil dari masing-masing Indeks Pembangunan Manusia, dilakukan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{X_{i1} \times X_{i2} \times X_{i3}}$$

X_i	= Indeks Komponen
-------	-------------------

2.2.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah juga menjadi acuan kebijakan pemerintah yang harus dijalankan terhadap kebijakan tersebut.

Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave mengembangkan model hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Tahap ini dibedakan menjadi 3 yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, pemerintah diharuskan menyediakan prasarana seperti pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur melalui investasi pemerintah. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap dilakukan, namun investasi swasta lebih mendominasi dalam tahap ini. Jika pihak swasta menjadi pihak yang lebih dominan dari pemerintah dalam berinvestasi, hal ini dapat menyebabkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan kuantitas barang dan jasa lebih banyak, serta peningkatan kualitas barang dan jasa. Pada tingkat lebih lanjut, aktivitas

pemerintah untuk pembangunan ekonomi beralih ke pengeluaran pemerintah untuk program sosial, pelayanan kesehatan, kesejahteraan hari tua dari yang sebelumnya merupakan aktivitas pemerintah pada penyediaan prasarana. (Mangkoesoebroto, 2001)

Teori Adolph Wagner

Hukum Wagner didasari dari pengamatan empiris pada negara maju seperti USA, Jerman, dan Jepang. Wenger menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan perekonomian, hubungan dalam siklus perekonomian semakin kompleks. Hal ini yang mendorong peran pemerintah untuk mengatur hubungan yang ada dalam masyarakat, hukum pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, dan sektor lainnya. Pemerintah sendiri, memiliki kebebasan bertindak sebagai individu yang dijelaskan dalam teori organis (*organic theory of state*). (Mangkoesoebroto, 2001)

Teori Keynesian

Keynesian memiliki pandangan bahwa pemerintah memiliki peranan dalam perekonomian. Apabila pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka akan menaikkan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, maka akan menurunkan pendapatan nasional. Meningkatkan pendapatan nasional dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah juga harus tahu bahwa anggaran yang dikeluarkan tepat pada penerimaannya. Disisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan peranannya agar tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997)

a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, dan juga keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, salah satunya disebabkan oleh pendidikan. Peningkatan standar pendidikan akan mendorong ekspansi ekonomi suatu negara. Pendanaan untuk pendidikan sangat penting dilakukan

pemerintah untuk membangun fasilitas terbaik dan menerapkan sistem pendidikan yang efektif. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan salah satu cara konkret menginvestasikan uang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia berhak memiliki akses yang sama terhadap layanan dan infrastruktur pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan ditunjukkan dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN. (Wahid, 2012)

Pertumbuhan sektor pendidikan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan masyarakat menentukan tingkat kemudahan penduduk usia kerja untuk memahami, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi yang akan meningkatkan standar ekonomi dan kehidupan suatu negara. (Winarti, 2014)

Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bisa meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, akan lebih besar mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan konsumsi masyarakat naik, sehingga roda perekonomian akan berjalan dengan baik pula.

Pendidikan yang baik dapat terpenuhi apabila akses pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan kemudahan masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila kualitas pendidikan pada suatu daerah mengalami peningkatan, akan menjadikan Indeks Pembangunan Manusia juga naik.

b. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Salah satu indikator yang sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi adalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena produksi yang baik bergantung pada kesehatan yang baik juga. Menurut Tjiptoherijanto (1993), terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kesehatan seseorang yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Cara tersebut seperti peningkatan kesehatan seseorang dapat menaikkan partisipasi angkatan kerja, peningkatan pencapaian pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja.

Todaro & Smith (2003) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada anggaran kesehatan diberikan untuk memenuhi salah satu hak dasar atas pelayanan kesehatan dalam bentuk fasilitas dan layanan medis yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

Safira, (2019) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan pada suatu wilayah akan memudahkan akses penduduk untuk mendapatkan perawatan medis yang berkualitas. Apabila setiap orang dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, menjadikan kondisi kesehatan masyarakat dalam keadaan prima yang dapat menurunkan terganggunya kegiatan ekonomi ketika ada sejumlah masyarakat yang tidak mendapatkan pengobatan dengan baik. Selain itu, ketahanan masyarakat juga akan terjaga dengan adanya infrastruktur kesehatan yang memadai.

Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah kesehatan. Apabila masyarakat memiliki kesehatan yang baik, akan meningkatkan produktifitas dalam bekerja yang akan menghasilkan pendapatan masyarakat untuk peningkatan pembangunan manusia. Akses kesehatan pada masyarakat dapat didukung dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kesehatan. Alokasi anggaran dapat digunakan untuk pemenuhan kemudahan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta

pemenuhan nutrisi terutama untuk ibu hamil menyusui dan anak-anak balita guna menekan angka kematian bayi yang nantinya dapat meningkatkan pembangunan manusia.

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian pada tingkat nasional maupun regional adalah pertumbuhan ekonomi. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, pandangan Adam Smith terhadap teori ini yaitu pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah sebagai hasil dari seluruh aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua harga yang dapat digunakan dalam perhitungan PDRB yaitu, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku merupakan jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB harga konstan merupakan harga suatu barang atau jasa yang ditentukan dengan harga pada tahun tertentu yang menjadi tahun dasar.

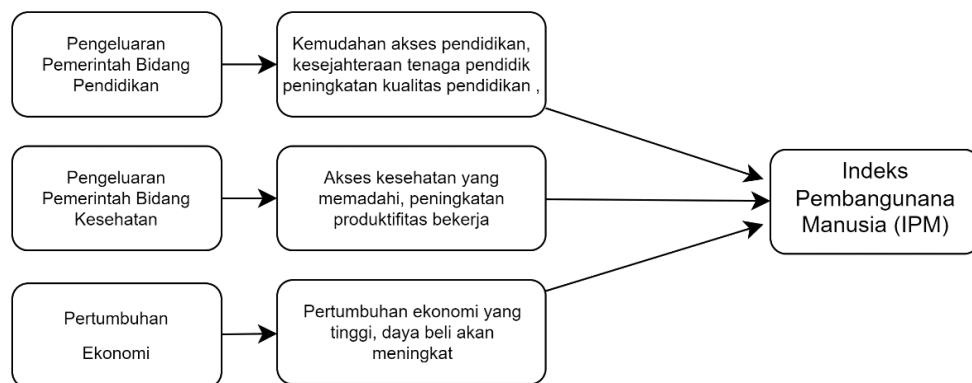
Teori Pertumbuhan Klasik

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, kekayaan, dan juga teknologi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung sesuai dengan pandangan ahli ekonomi klasik mengenai hasil tambahan yang terus menerus berkurang, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi baru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Investasi akan terjadi apabila pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar dari modal investasi yang diberikan. Tingkat pengembalian modal dari investasi akan menjadi lebih tinggi, jika pada suatu daerah memiliki kekayaan yang berlebihan namun memiliki penduduk yang relatif sedikit. Sebaliknya, jika penduduk pada suatu daerah mengalami kenaikan, maka dapat menurunkan kegiatan ekonomi yang menjadikan tingkat produktivitas setiap penduduk menjadi berkurang.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Apabila masyarakat memiliki pendapatan, maka akan terjadi transaksi yang menghasilkan konsumsi. Hal ini akan tercipta daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Dengan adanya konsumsi yang menyebabkan transaksi, dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan adanya pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dari suatu permasalahan yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua
2. Diduga pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua
3. Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan jenisnya, data ini termasuk dalam data kuantitatif berbentuk data panel yang merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua. Penelitian ini menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah kesehatan, serta laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan.

Data pada penelitian ini bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi PDRB daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Indonesia, dan *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengenai laporan realisasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

3.2. Variabel Operasional

Penelitian ini menguji 4 variabel yaitu satu variabel dependen dan tiga variabel independen pada masing-masing provinsi. Variabel yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia untuk variabel dependen, dan pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, dan laju pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) untuk variabel independen.

3.2.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang membandingkan kinerja rata-rata suatu negara dalam tiga bidang utama pembangunan manusia yaitu bidang kesehatan yang ditentukan dari harapan hidup saat lahir, bidang pendidikan yang ditentukan oleh rata-rata lama sekolah dan persentase angka melek huruf, serta pada indeks pendapatan yang ditentukan oleh daya beli per konsumsi per kapita.

3.2.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1)

Alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan dikenal dengan anggaran pendidikan yang nantinya akan didistribusikan melalui transfer daerah yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan di daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan pendidikan termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk pembiayaan pendidikan kedinasan.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)

Pemerintah membelanjakan dana untuk pelaksanaan dan pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai percepatan peningkatan kesehatan dan juga peningkatan akses layanan jaminan kesehatan nasional yang berkualitas.

3. Pertumbuhan Ekonomi (X3)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu wilayah dalam waktu tertentu pada tingkat daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan tahun 2010 di wilayah Kalimantan Timur dan Papua. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu dengan regresi data panel yang terdiri dari gabungan antara dua data yaitu data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* merupakan data yang tersusun dari data urutan waktu seperti data harian, bulanan, dan tahunan. Sedangkan, data *cross section* merupakan data yang berisi kumpulan waktu yang sama dari beberapa daerah (Widarjono,

2009). Tujuan dari penelitian ini yaitu memilih model yang sesuai untuk diterapkan dalam menilai pengaruh hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it}$$

Keterangan:

Y	= Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
β_0	= Konstanta
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
X_1	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rupiah)
X_2	= Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan (Rupiah)
X_3	= Laju Pertumbuhan PDRB menurut harga konstan (Persen)
i	= Kabupaten/Kota
t	= Waktu (tahun)

Terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam analisis regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

3.3.1. **Common effect Model**

Common Effect Model (CEM) merupakan teknik paling sederhana yang digunakan untuk data panel yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Metode ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan regresi pada *common effect model* sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it}$$

3.3.2. **Fixed Effect Model**

Metode *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan metode untuk mengetahui adanya perbedaan dengan *slope* yang tetap sama antar perusahaan. Penggunaan data panel dengan *dummy variable* digunakan dalam teknik estimasi untuk menghitung perbedaan intersep. Perbedaan intersep dapat terjadi karena perbedaan budaya kerja, internship, maupun manajerial. Persamaan metode ini adalah sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it}$$

3.3.3. *Random Effect Model*

Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengestimasi adanya variabel gangguan yang terdapat pada data panel yang diduga memiliki keterkaitan antar waktu dan antar individu. Kelebihan yang didapatkan dari menggunakan *random effect model* yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Widarjono, (2009) menyatakan bahwa variabel dummy yang digunakan dalam *fixed effect model* memiliki kelemahan yang dapat diatasi oleh *random effect model*. Kriteria bahwa jumlah *cross section* lebih banyak dari jumlah variabel penelitian harus dipenuhi oleh metode analisis data panel dengan *random effect model*. Adanya dua komponen dalam residualnya, model ini juga dikenal dengan *Error Components Model* (ECM)

3.4. Pemilihan Uji Pada Estimasi Regresi

Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang tepat dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengidentifikasi model terbaik antara *fixed effect model* dan *common effect model* untuk mengestimasi data panel. Widarjono, (2009) menyatakan bahwa uji chow membandingkan antara *fixed effect model* dengan *common effect model*. Program Eviews digunakan untuk melakukan uji chow dalam penelitian ini. Nilai probabilitas uji F menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan uji chow. Hipotesis dalam pengujian model ini sebagai berikut:

H0 : *common effect model*

H1 : *fixed effect model*

Jika nilai signifikansi probabilitas *cross section* chi square $< \alpha = 5\%$, dapat diputuskan bahwa hasil dari uji chow adalah *fixed effect* yang artinya uji hausman perlu dilakukan untuk menentukan *fixed effect model* atau *random effect model*.

3.4.2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk mengidentifikasi model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect model* atau *random effect model*. Nilai probabilitas *cross section* merupakan dasar dalam pengambilan keputusan untuk uji hausman (Widarjono, 2009). Apabila nilai probabilitas *cross section* *random* kurang dari 5%, maka model pendekatan yang dipilih adalah *fixed effect model*. Apabila nilai probabilitas *cross section*

random lebih dari 5%, maka model pendekatan yang dipilih adalah *random effect model*. Hipotesis dalam Uji hausman sebagai berikut:

H0 : *random effect model*

H1 : *fixed effect model*

3.4.3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) memiliki tujuan untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan dalam pemodelan data panel yaitu *random effect model* atau *common effect model* (Widarjono, 2009). Uji LM digunakan untuk memilih *random effect* atau *common effect* tanpa adanya variabel dummy dan mengetahui bahwa keunggulan *random effect* lebih baik dari *common effect*. Uji LM didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis dalam Uji LM sebagai berikut:

H0 : *common effect model*

H1 : *random effect model*

3.5. Uji Statistik

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan melakukan uji statistik sebagai berikut:

3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran kemampuan model untuk menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dapat ditunjukkan dengan nilai *R-Squared* yang diperoleh dari pengujian koefisien determinasi. Apabila nilai mendekati 1 (satu) dan jauh dari 0 (nol), dapat diindikasikan bahwa variabel independen dapat memberikan informasi untuk menggambarkan variabel dependen yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika variabel independen akan menjelaskan keterkaitan dengan variabel dependen dengan sangat terbatas apabila nilai koefisien determinasi yang kecil.

3.5.2. Uji Parsial (t Statistik)

Hipotesis penelitian mengenai pengaruh pada setiap variabel independen dan variabel dependen diuji dengan menggunakan uji t. Salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara hasil rata-rata sampel dari dua sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama. Tabel koefisien dapat digunakan

untuk mengambil keputusan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0.05, maka menerima H_0 dan menolak H_a . Sebaliknya, apabila uji t memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka menolak H_0 dan menerima H_a .

3.5.3. Uji Simultan (F Statistik)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen apabila nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0.05. Apabila nilai $F < 0.05$ maka menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai $F > 0.05$ maka menerima H_0 dan menolak H_a . Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini menggunakan data Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2022 dan Provinsi Papua tahun 2016-2022. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti pengaruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian ini untuk membandingkan faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya pembangunan manusia di Indonesia, dengan membandingkan provinsi yang memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dan terendah.

Langkah dalam pengolahan data dapat dimulai dengan statistik deskriptif yang merupakan analisis statistik mengenai data yang digunakan menggunakan mean yang merupakan rata-rata dari jumlah data yang digunakan, median yang merupakan nilai tengah dari data yang digunakan, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi yang merupakan perbedaan nilai data dan banyak data yang dapat dilihat dari akar jumlah kuadrat perbedaan nilai data. Hasil dari statistik deskriptif dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 4.1 Deskripsi Data di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2022**

Variabel	N	Mean	Median	Nilai Maximum	Nilai Minimum	Standard Deviation
IPM	80	74.029625	73.02500	81.43000	64.89000	4.364396
PEND	80	5.096653	4.332338	18.548969	1.176244	3.393850
PKES	80	3.001047	2.687853	9.311988	51.74636	1.729473
PE	80	1.906000	2.410000	14.49000	-7.170000	3.481422

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan sampel yang digunakan tahun 2015-2022 memiliki rata-rata sebesar 74.03. Hal ini menunjukkan IPM di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi. *United Nations Development Program* (UNDP) memberikan standar pembangunan manusia dengan 4 kriteria yaitu, apabila nilai IPM > 80 termasuk dalam kategori sangat tinggi, IPM dengan nilai 70-79 termasuk dalam kategori tinggi, dan IPM dengan nilai 60-69 termasuk dalam kategori sedang, dan IPM < 60 termasuk dalam kategori rendah. Indeks Pembangunan Manusia memiliki median sebesar 73.02, nilai maksimum sebesar 81.43, nilai minimum 64.89 dan standar deviasi sebesar 4.364396.

Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan yang dilakukan observasi dengan sample sebanyak 80 di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata realisasi anggaran belanja senilai Rp. 509 miliar. Kemudian, median yang ada senilai Rp. 433 miliar, nilai maksimum sebesar Rp. 1.854 triliun, nilai minimum sebesar Rp 117 miliar serta standar deviasi yang dimiliki sebesar Rp. 339 miliar.

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan yang dilakukan observasi dengan 80 sample di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata realisasi anggaran belanja senilai Rp. 300 miliar. Sedangkan median yang dimiliki senilai Rp. 268 miliar, nilai minimum sebesar Rp. 51 miliar, nilai maksimum sebesar Rp. 931 miliar, dan standar deviasi sebesar Rp. 172 miliar.

Variabel pertumbuhan ekonomi yang dilakukan observasi dengan menggunakan 80 sample menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.906 persen. Kemudian, median yang dimiliki sebesar 2.41 persen, nilai maksimum sebesar 14.49 persen, nilai minimum sebesar -7.17 persen, serta standar deviasi yang dimiliki sebesar 3.48 persen.

Tabel 4.2 Deskripsi Data di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2016-2022

Variabel	N	Mean	Median	Nilai Maximum	Nilai Minimum	Standard Deviation
IPM	202	56.79624	55.77500	80.61000	26.56000	11.30914
PEND	202	1.534837	1.236830	5.532134	1.110288	8.731730
KES	202	1.569462	1.394126	4.565783	5.855038	8.813824
PE	202	3.881287	4.535000	36.85000	-38.52000	4.842739

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

Tabel 4.2 dapat menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Papua dengan 202 sampel yang digunakan pada tahun 2016-2022 memiliki rata-rata sebesar 56.79. Hal ini menunjukkan IPM di Provinsi Papua cukup rendah. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua memiliki median sebesar 55.77, nilai maksimum 80.61, nilai minimum 26.56 dan standar deviasi sebesar 11.30914.

Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan yang dilakukan observasi dengan sample sebanyak 202 di Kabupaten dan Kota Provinsi Papua memiliki rata-rata realisasi anggaran belanja senilai Rp. 153 miliar. Kemudian median yang dimiliki senilai Rp. 123 miliar, nilai maksimum sebesar Rp. 553 miliar, nilai minimum sebesar Rp. 111 miliar, dan standar deviasi yang dimiliki sebesar Rp. 87 miliar.

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan yang dilakukan observasi dengan 202 sample di Kabupaten dan Kota Provinsi Papua memiliki rata-rata realisasi anggaran belanja senilai Rp. 156 miliar. Sedangkan median yang dimiliki

senilai Rp. 139 miliar, nilai minimum sebesar Rp. 4 miliar, nilai maksimum sebesar Rp. 585 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 88 miliar.

Variabel pertumbuhan ekonomi yang dilakukan observasi dengan menggunakan 202 sample menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3.895 persen. Kemudian, median yang dimiliki sebesar 4.55 persen, nilai maksimum sebesar 36.85 persen, nilai minimum sebesar -38.52 persen, dan standar deviasi yang dimiliki sebesar 4.834 persen.

4.2. Hasil Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis dengan data panel yang ditentukan melalui metode pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Guna menentukan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini, perlu dilakukan uji chow yang berfungsi untuk memilih antara pendekatan *common effect* atau *fixed effect*. Kemudian, terdapat uji LM yang digunakan untuk memilih pendekatan antara *common effect* atau *random effect*, dan uji hausman yang digunakan untuk memilih pendekatan antara *fixed effect* atau *random effect*. Dari ketiga uji tersebut, nantinya akan dipilih metode pendekatan terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.2.1. Hasil Regresi

Terdapat tiga model regresi yang digunakan dalam analisis regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

4.2.1.1. *Common Effect Model*

Pengujian regresi data panel menggunakan *common effect model* untuk provinsi Kalimantan Timur dan Papua sebagai berikut:

Tabel 4.3 *Common Effect Model* Provinsi Kalimantan Timur dan Papua

Variabel	Kalimantan Timur		Papua	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	-11.23724	0.6024	-200.6943	0.0000
Pend (Log)	2.256259	0.1284	11.96887	0.0000
Kes (Log)	0.941768	0.5889	-1.909219	0.2026
PE	0.078478	0.5438	-0.027726	0.8421
R-Squared	0.199854		0.294948	
Prob (F-Statistic)	0.000689		0.000000	

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

4.2.1.2. *Fixed Effect Model*

Pengujian regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* pada Provinsi Kalimantan Timur dan Papua sebagai berikut:

Tabel 4.4 *Fixed Effect Model* Provinsi Kalimantan Timur dan Papua

Variabel	Kalimantan Timur		Papua	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	59.34529	0.0000	-3.918921	0.6178
Pend (Log)	-2.128614	0.0081	1.111517	0.0017
Kes (Log)	2.720714	0.0000	1.267638	0.0000
PE	0.065727	0.0371	-0.057177	0.0076
R-Squared	0.966336		0.986910	
Prob (F-Statistic)	0.000000		0.000000	

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

4.2.1.3. *Random Effect Model*

Pengujian regresi data panel dengan menggunakan *random effect model* pada Provinsi Kalimantan Timur dan Papua sebagai berikut:

Tabel 4.5 *Random Effect Model* Provinsi Kalimantan Timur

Variabel	Kalimantan Timur		Papua	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	56.79107	0.0000	-5.933290	0.4568
Pend (Log)	-1.943107	0.0134	1.206189	0.0006
Kes (Log)	2.629034	0.0000	1.251529	0.0000
PE	0.066104	0.0355	-0.056482	0.0082
R-Squared	0.345427		0.275642	
Prob (F-Statistic)	0.000000		0.000000	

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

4.2.2. **Pemilihan Model Terbaik**

4.2.2.1. **Uji Chow**

Uji chow (*Chow test*) digunakan untuk menentukan model terbaik dengan menggunakan pendekatan *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini dilakukan dengan ketentuan uji F-statistik sebagai berikut:

H₀ : *Common effect* model adalah model terbaik

H_a : *Fixed effect* model adalah model terbaik

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Effect Test	Kalimantan Timur			Papua		
	Statistic	d.f.	Prob.	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	169.498969	(9.67)	0.0000	322.841595	(28.171)	0.0000
Cross-section Chi-square	253.468955	9	0.0000	809.247905	28	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari uji chow yang didapatkan nilai probabilitas Cross-section F di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua sebesar 0.0000 yang berarti bahwa nilai p-value lebih kecil dari alpha 5% yang artinya menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa *fixed effect* adalah model terbaik pada Provinsi Kalimantan Timur dan Papua

4.2.2.2. Uji Lagrange Multiplier

Uji LM digunakan untuk menentukan model terbaik dengan menggunakan pendekatan *common effect* atau *random effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini sebagai berikut:

H0 : *Common effect* model adalah model terbaik

Ha : *Random effect* model adalah model terbaik

Tabel 4.7 Hasil Uji LM

Effect Test	Kalimantan Timur			Papua		
	Cross-section	Time	Both	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	236.4009 (0.0000)	1.644642 (0.1997)	238.0455 (0.0000)	319.7751 (0.0000)	2.385833 (0.1224)	322.1610 (0.0000)

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil Uji LM pada Provinsi Kalimantan Timur dan Papua yang ditunjukkan pada tabel 4.7 memiliki nilai P-Value Breusch-Pagan Cross-Section yang sama sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 5% sehingga menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa *random effect* adalah model yang terbaik.

4.2.2.3. Uji Hausman

Uji hausman merupakan uji untuk memilih model terbaik dengan menggunakan pendekatan *fixed effect* dan *random effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini sebagai berikut:

H0 : *Random effect* adalah model terbaik

Ha : *Fixed effect* adalah model terbaik

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Kalimantan Timur			Papua		
	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.045988	3	0.5629	16.004252	3	0.0011

Sumber : Hasil olah data Eviews 12, 2014

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji hausman pada Provinsi Kalimantan Timur didapatkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0.5629 lebih besar dari alpha 5% sehingga gagal menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa *random effect* merupakan model terbaik pada Provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain Provinsi Papua memiliki nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0.0011 lebih kecil dari alpha 5% sehingga menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa *fixed effect* merupakan model terbaik untuk Provinsi Papua

4.2.3. Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil analisis untuk memilih model terbaik yang telah dilakukan dengan melakukan uji chow, uji LM dan uji hausman didapatkan model terbaik yaitu *random effect model* untuk Provinsi Kalimantan Timur dan model terbaik pada Provinsi Papua adalah *fixed effect model*.

Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel Model Terbaik Provinsi Kalimantan Timur dan Papua

Variabel	Kalimantan Timur		Papua	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	56.79107	0.0000	-3.918921	0.6178
Pend (Log)	-1.943107	0.0134	1.111517	0.0017
Kes (Log)	2.629034	0.0000	1.267638	0.0000
PE	0.066104	0.0355	-0.057177	0.0076
R-Squared	0.345427		0.986910	
Prob (F-Statistic)	0.000000		0.000000	

Sumber: Hasil olah data Eviews 12, 2024

Hasil regresi *random effect model* pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan pada tabel 4.9 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

$$Y_{it} = 56.79107 + (-1.943107) + 2.629034 + 0.066104$$

Hasil regresi *fixed effect model* yang ditunjukkan pada tabel 4.9 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

$$Y_{it} = (-3.918921) + 1.111571 + 1.267638 + (-0.057177)$$

4.2.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai R-squared (R^2). Apabila nilai yang dimiliki oleh R-squared mendekati nol, maka variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kontribusi yang terbatas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi R-squared menjauhi nol dan mendekati satu, maka variabel bebas dapat menjelaskan keterkaitan terhadap variabel bebas.

Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R-squared) dalam *random effect model* untuk regresi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 0.345247. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

(X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pertumbuhan ekonomi, mampu menjelaskan keterkaitannya dengan variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 34.5 persen, sisanya ditentukan variabel lain di luar model sebesar 65.5 persen.

Koefisien determinasi (R-squared) dalam *fixed effect model* untuk regresi di Provinsi Papua menunjukkan nilai sebesar 0.986910 yang menunjukkan bahwa variabel bebas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pertumbuhan ekonomi, mampu menjelaskan keterkaitannya dengan variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 98.6 persen dan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar model sebesar 1.4 persen.

4.2.3.2. Uji Simultan (F statistik)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan jika nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari alpha 5 persen (0.05). Hipotesis pada uji simultan sebagai berikut:
 H_0 : variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_a : variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan untuk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai F-statistik pada *random effect model* diperoleh sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$ sehingga menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Hasil regresi yang dilakukan untuk Papua menunjukkan probabilitas F-statistic pada *fixed effect model* sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$ sehingga menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_1), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

4.2.3.3. Uji Parsial (t Statistik)

Uji parsial atau t statistik digunakan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Pengujian ini dapat ditentukan dengan membandingkan probabilitas pada derajat keyakinan tertentu. Jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0.05 (5%), maka gagal menolak H_0 dan menolak H_a . Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Hipotesis tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 \neq 0$, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

1. Provinsi Kalimantan Timur

a. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Didapatkan nilai p-value pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar $0.0134 < \alpha = 5\%$ yang menunjukkan signifikansi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai koefisien yang didapatkan sebesar -1.943107. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Nilai P-value yang didapatkan pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ dan nilai koefisien sebesar 2.629034. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai P-value yang didapatkan pada pertumbuhan ekonomi sebesar $0.0355 < \alpha = 5\%$ dan nilai koefisien sebesar 0.066104 yang berarti signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Provinsi Papua

a. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Didapatkan nilai p-value pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar $0.0017 < \alpha = 5\%$ yang berarti signifikan dan nilai koefisien sebesar 1.111517. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Nilai P-value yang didapatkan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$ yang berarti signifikan dan menunjukkan nilai koefisien sebesar 1.267638. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai P-value yang didapatkan pada pertumbuhan ekonomi sebesar $0.0076 < \alpha = 5\%$ yang berarti signifikan dan nilai koefisien sebesar -0.57177. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.2.4. Interpretasi Hasil

Persamaan yang diperoleh dari pengolahan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 (IPM) + \beta_1 X_{1it} (PP Pendidikan) + \beta_2 X_{2it} (PP Kesehatan) + \beta_3 X_{3it} (PE) + \epsilon_{it}$$

1. Provinsi Kalimantan Timur

$$Y_{it} = 56.79107 + (-1.943107) + 2.629034 + 0.066104$$

a. Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur memiliki nilai konstanta sebesar 56.79107 yang artinya tidak adanya variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 56.79107.

b. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -1.943107. Hal ini menunjukkan jika variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 % maka

Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar 1.943107 %.

- c. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki nilai koefisien sebesar 2.629034. Hal ini menunjukkan jika variabel kesehatan mengalami kenaikan sebesar 1 % akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 2.629034 %.
- d. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 0.066104 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 % pada variabel pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.066104 %

2. Provinsi Papua

$$Y_{it} = (-3.918921) + 1.111571 + 1.267638 + (-0.057177)$$

- a. Indeks Pembangunan Manusia di Papua memiliki nilai konstanta sebesar -3.918921 yang artinya apabila tidak ada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar 3.918921.
- b. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar 1.111571. Hal ini menunjukkan jika variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 % maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar 1.111571 %.
- c. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki nilai koefisien sebesar 1.267638. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesehatan mengalami kenaikan sebesar 1 % akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1.267638 %.
- d. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar -0.057177 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 % pada variabel pertumbuhan ekonomi akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.057177 %.

4.2.4.1. Hasil Analisis Kabupaten/Kota

Tabel 4.10 *Cross Effect* Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Effect		
Berau	0,132201	56,79107	56,92327
Kartanegara	-1,077803	56,79107	55,71327
Kutai Barat	-3,365233	56,79107	53,42584
Kutai Timur	-0,943935	56,79107	55,84714
Paser	-2,036248	56,79107	54,75482
Balikpapan	6,145088	56,79107	62,93616
Bontang	5,052935	56,79107	61,84401
Samarinda	6,176264	56,79107	62,96733
Penajam Paser	-2,733456	56,79107	54,05761
Utara			
Mahakam Ulu	-7,349813	56,79107	49,44126

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien model acak di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki model yang berbeda-beda. Hal ini menjelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hasil yang variatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1. Kabupaten Berau

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Berau sebesar 56,92327. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebesar 56,92327.

2. Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 55,71327. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan

Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebesar 55,71327.

3. Kabupaten Kutai Barat

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Kutai Barat sebesar 53,42584. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sebesar 53,42584.

4. Kabupaten Kutai Timur

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Kutai Timur sebesar 55,84714. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sebesar 55,84714

5. Kabupaten Paser

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Paser sebesar 54,75482. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,75482.

6. Kota Balikpapan

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kota Balikpapan sebesar 62,93616. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 62,93616.

7. Kota Bontang

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kota Bontang sebesar 61,84401. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebesar 61,84401.

8. Kota Samarinda

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kota Samarinda sebesar 62,96733. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebesar 62,96733.

9. Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 54,05761. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,05761.

10. Kabupaten Mahakam Ulu

Tabel 4.17 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 49,44126. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur sebesar 49,44126.

Tabel 4.11 *Cross Effect* Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Effect		
Biak Numfor	14,23196	-3,918921	10,31304
Jayapura	13,90236	-3,918921	9,98344
Jayawijaya	0,291245	-3,918921	-3,62768
Merauke	9,262477	-3,918921	5,34356
Mimika	14,74759	-3,918921	10,82867
Nabire	10,61511	-3,918921	6,69619
Paniai	-1,349434	-3,918921	-5,26836
Puncak Jaya	-8,511115	-3,918921	-12,43004
Kepulauan Yapen	9,535322	-3,918921	5,61640
Kota Jayapura	22,07918	-3,918921	18,16026
Sarmi	7,386064	-3,918921	3,46714
Keerom	9,944016	-3,918921	6,02510
Yahukimo	-8,617410	-3,918921	-12,53633
Pegunungan Bintang	-12,35568	-3,918921	-16,27460
Tolikara	-7,963286	-3,918921	-11,88221
Boven Digoel	3,939914	-3,918921	0,02099
Mappi	0,441175	-3,918921	-3,47775
Asmat	-7,847694	-3,918921	-11,76662
Waropen	9,092883	-3,918921	5,17396
Supiori	6,929629	-3,918921	3,01071
Mamberamo Raya	-4,999013	-3,918921	-8,91793
Mamberamo Tengah	-8,539127	-3,918921	-12,45805
Yalimo	-8,307688	-3,918921	-12,22661
Kabupaten Lanny Jaya	-9,221898	-3,918921	-13,14082
Kabupaten Nduga	-25,26380	-3,918921	-29,18272
Dogiyai	-1,251971	-3,918921	-5,17089
Puncak	-13,34263	-3,918921	-17,26155
Intan Jaya	-8,864964	-3,918921	-12,78389
Deiyai	-5,963214	-3,918921	-9,88214

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa koefisien model acak di Kabupaten/Kota Provinsi Papua memiliki model yang berbeda-beda. Hal ini menjelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hasil yang variatif terhadap indeks pembangunan manusia.

1. Kabupaten Biak Numfor

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Biak Numfor sebesar 10,31304. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua sebesar 10,31304.

2. Kabupaten Jayapura

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Jayapura sebesar 9,98344. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebesar 9,98344.

3. Kabupaten Jayawijaya

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Jayawijaya sebesar -3,62768. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebesar -3,62768.

4. Kabupaten Merauke

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Merauke sebesar 5,34356. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merauke Provinsi Papua sebesar 5,34356.

5. Kabupaten Mimika

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Mimika sebesar 10,82867. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah

bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua sebesar 10,82867.

6. Kabupaten Nabire

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Nabire sebesar 6,69619. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nabire Provinsi Papua sebesar 6,69619.

7. Kabupaten Paniai

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Paniai sebesar -5,26836. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Paniai Provinsi Papua sebesar -5,26836.

8. Kabupaten Puncak Jaya

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Puncak Jaya sebesar -12,43004. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua sebesar -12,43004.

9. Kepulauan Yapen

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kepulauan Yapen sebesar 5,61640. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Yapen Provinsi Papua sebesar 5,61640.

10. Kota Jayapura

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kota Jayapura sebesar 18,16026. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka,

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jayapura Provinsi Papua sebesar 18,16026.

11. Kabupaten Sarmi

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Sarmi sebesar 3,46714. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sebesar 3,46714.

12. Kabupaten Keerom

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Keerom sebesar 6,02510. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Keerom Provinsi Papua sebesar 6,02510.

13. Kabupaten Yahukimo

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Yahukimo sebesar -12,53633. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua sebesar -12,53633.

14. Kabupaten Pegunungan Bintang

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar -16,27460. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua sebesar -16,27460.

15. Kabupaten Tolikara

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Tolikara sebesar -11,88221. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua sebesar -11,88221.

16. Kabupaten Boven Digoel

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Boven Digoel sebesar 0,02099. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua sebesar 0,02099.

17. Kabupaten Mappi

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Mappi sebesar -3,47775. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mappi Provinsi Papua sebesar -3,47775.

18. Kabupaten Asmat

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Asmat sebesar -11,76662. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Asmat Provinsi Papua sebesar -11,76662.

19. Kabupaten Waropen

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Waropen sebesar 5,17396. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Waropen Provinsi Papua sebesar 5,17396.

20. Kabupaten Supiori

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Supiori sebesar 3,01071. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Supiori Provinsi Papua sebesar 3,01071.

21. Kabupaten Mamberamo Raya

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Mamberamo Raya sebesar -8,91793. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua sebesar -8,91793.

22. Kabupaten Mamberamo Tengah

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar -12,45805. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua sebesar -12,45805.

23. Kabupaten Yalimo

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Yalimo sebesar -12,22661. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua sebesar -12,22661.

24. Kabupaten Lanny Jaya

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Lanny Jaya sebesar -13,14082. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua sebesar -13,14082.

25. Kabupaten Nduga

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Nduga sebesar -29,18272. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nduga Provinsi Papua sebesar -29,18272.

26. Kabupaten Dogiyai

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Dogiyai sebesar -5,17089. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua sebesar -5,17089.

27. Kabupaten Puncak

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Puncak sebesar -17,26155. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Puncak Provinsi Papua sebesar -17,26155.

28. Kabupaten Intan Jaya

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Intan Jaya sebesar -12,78389. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua sebesar -12,78389.

29. Kabupaten Deiyai

Tabel 4.18 menunjukkan nilai intersep pada Kabupaten Deiyai sebesar -9,88214. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Maka, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua sebesar -9,88214.

Pengolahan regresi data panel menghasilkan perbedaan konstanta antar daerah Kabupaten/Kota pada masing-masing provinsi. Tabel 4.17 dan 4.18 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada masing-masing provinsi belum merata. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia sangat terlihat di Provinsi Papua. Dapat dilihat pada tabel 4.18 bahwa Provinsi Papua memiliki nilai koefisien sebesar -3,918921. Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ada pada Kota Jayapura dengan koefisien sebesar 18,16026 dan

Kabupaten Nduga memiliki nilai koefisien terendah sebesar -29,18272. Hasil berbeda ditunjukkan pada Provinsi Kalimantan Timur. Tabel 4.17 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki perbedaan nilai yang tidak signifikan yang ditunjukkan dengan selisih nilai koefisien antar daerah yang tidak cukup besar. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda dengan nilai koefisien sebesar 62,967334 dan Indeks Pembangunan Manusia terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai koefisien sebesar 49,441257.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Kalimantan Timur memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dan teori yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh pendidikan tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada Provinsi Papua bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia. Hal ini dapat disebabkan oleh akses pendidikan yang tidak merata dan kesenjangan ekonomi yang menyebabkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas akan mendapatkan akses pendidikan yang baik dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah akan mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi.

Hasil penelitian di Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atdjar (2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia karena anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Anggaran

yang dikeluarkan pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan mutu program pendidikan, pemberian beasiswa untuk pelajar maupun mahasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan juga kesejahteraan tenaga pendidik.

Penelitian lain yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah penelitian yang dilakukan oleh Anantika & Sasana (2020) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Masalah tersebut dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan.

Pengaruh pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Papua memiliki hasil yang berbeda dengan Kalimantan Timur. Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan manusia di Papua menunjukkan hasil positif signifikan. Kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan salah satu faktornya adalah pendidikan. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan dapat dilihat dengan adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dijalankan dengan adanya investasi pada bidang pendidikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palayukan (2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Aspek yang digunakan dalam alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk menunjang fasilitas yang menunjang pelaksanaan pendidikan yang layak. Selain itu, pembangunan manusia juga dapat dilakukan dengan program pendidikan yang dilakukan pemerintah. Febrianto & Astrid (2023) juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah pada pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang ditunjukkan dengan banyaknya anak-anak yang bersekolah dan mendapatkan akses informasi pendidikan yang baik.

4.3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas dari masing-masing provinsi kurang dari 5% dan nilai koefisiennya bernilai positif. Apabila indeks kesehatan mengalami peningkatan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Adanya pengaruh kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan yang maksimal, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anantika & Sasana (2020) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) yang dapat ditunjukkan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mongan (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan investasi pada bidang kesehatan sudah tepat sasaran dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien pada pertumbuhan ekonomi memiliki nilai positif dengan probabilitas kurang dari 5%. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Provinsi Papua yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan

Indeks Pembangunan Manusia memiliki keterkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan membawa masyarakat kepada tingkat pendapatan yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian di Kalimantan Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Bowo (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengalami penurunan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chaironi & Prakoso (2022) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan menunjukkan nilai elastisitas positif dan pembangunan manusia yang dianggap permanen serta berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Provinsi Papua pada variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien pada pertumbuhan ekonomi memiliki nilai negatif. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Khadijah, dkk (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang disebabkan karena adanya ketimpangan pendapatan yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak merata. Hal lain yang menjadi dampak dari ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

4.3.4. Perbandingan Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua

Pada hasil penelitian dan hasil diskusi yang telah dilakukan, didapatkan hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Kalimantan Timur dan Papua. Variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang

kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, faktor pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat menyebabkan ketidakmerataan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Hasil berbeda ditunjukkan pada Provinsi Papua bahwa, variabel yang mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan. Apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan naik. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketimpangan pendapatan yang menyebabkan ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua, didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua, diketahui bahwa model estimasi terbaik yang digunakan pada Provinsi Kalimantan Timur adalah *random effect model*. Sedangkan, model terbaik yang digunakan untuk Provinsi Papua adalah *fixed effect model*.
2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Papua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
3. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua memiliki hasil yang sama, yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan jika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Papua.
4. Variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil yang berbeda didapatkan di Provinsi Papua, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua, terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Kualitas pendidikan seharusnya dapat meningkatkan pembangunan manusia pada suatu daerah. Dari pendidikan yang baik, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesejahteraan secara finansial. Namun, pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur tidak diiringi dengan kenaikan indeks pembangunan manusia. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dengan peningkatan anggaran pendidikan dan mengalokasikan dana pendidikan dengan tepat sasaran, pemberian fasilitas pendidikan secara formal maupun informal dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Disisi lain, hasil berbeda ditunjukkan pada Papua, bahwa kenaikan kualitas pendidikan akan mempengaruhi pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pemerintah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemerintah untuk dapat mempertahankan kebijakan yang berlaku dan meningkatkan kinerja untuk mensejahterakan pendidikan yang ada di Provinsi Papua.
2. Kesehatan merupakan indikator penting dalam peningkatan pembangunan manusia. Apabila masyarakat memiliki kesehatan yang baik, dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peran pemerintah dalam peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dapat dioptimalkan dengan peningkatan anggaran kesehatan yang digunakan untuk memberikan fasilitas serta sarana

dan prasarana masyarakat untuk mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat menengah kebawah.

3. Jika perekonomian suatu daerah memiliki perkembangan yang baik, dampak yang didapatkan tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang progresif dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah. Apabila perekonomian suatu daerah memiliki pondasi yang kuat, maka pendapatan daerah akan naik. Hal ini bisa didapatkan melalui investasi, pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Jika pendapatan daerah tinggi, maka pemerintah dapat mengalokasikan anggaran daerah yang lebih besar untuk pembangunan dan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantyah, S., & Prasetya, O. B. (2019). Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua: Kajian Aspek Ekonomi Sosial. Yogyakarta.
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 167–178. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Atdjar, Rosmia. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. FEB Universitas Mulawarman: Kalimantan Timur
- Badan Pusat Statistik . (2020). Statistik Daerah Provinsi Papua 2020. www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik . (2017-2022). Indeks Pembangunan Manusia. www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik . (2023). Konsep Pembangunan Manusia. www.bps.go.id.
- Chaironi, M., & Aji Prakoso, J. (2022). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2015-2019. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(2), 147–156.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Data Series APBD. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2018). Analisis Keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14–29. IPB: Bogor.
- Fadilah, A., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2018). A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Febrianto, M., & Esther, Astrid Maria. (2023). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2841–2850. FEB Universitas Trisakti: Jakarta.

- Irawan & Akbar. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Klassen, Vol. 2(1)*
- Kacaribu, R.D., & Rindayati, W. (2013). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Papua.
- Khadijah, Siti. dkk. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungan. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi (JAIE), Vol.1(1), 74-82*. FEB Universitas Mulawarman: Aceh
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2001). Ekonomi Publik, BPFE: Yogyakarta.
- Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi terhadap IPM Provinsi Di Indonesia 2007-201. *Journal of Economics and Policy. 5(62), 271–279*. Semarang.
- Mongan, Jehuda. (2019). Pengaruh Pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Vol.4, (2), 163-176*. Yogyakarta.
- Mononimbar, T. Y., Lopian, A. L. C. P., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(3), 39–50*. Manado.
- Munawwaroh, Amar, S., & Idris. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Ekonomi, 2(3), 136–155*.
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kenangan, 12(2), 74–91*. Jakarta.
- Pemprov Kaltim. (2021). Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Kalimantan Timur
- Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta. webapi.bps.go.id.
- Safira, Djohan, S., & Nurjanana. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 21(2), 211–216. Samarinda.
- Sosilowati, dkk. (2017). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- The Jakarta Post. (2020). Development For The People: A Glimse Into Papua's Economic Future. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/paper/2020/07/10/development-for-the-people- a-glimpse-into-papuas-economic-future.html>
- Todaro & Smith. (2003). Pembangunan Ekonomi. Erlangga: Jakarta
- Wahid, B. A. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2011. *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar*, 4(1), 870–882. Makassar.
- Widarjono, Agus. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga. Yogyakarta
- Winarti, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. *Universitas Diponegoro*, 1–72. Semarang.
- Wulandari, Sefty. (2023). Transformasi Ekonomi Jadi Strategi Kaltim untuk Kelola APBD 2024 Secara Efisien dan Berkelanjutan. Diakses pada 2 April 2024. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/ekonomi/transformasi-ekonomi-jadi-strategi-kaltim-untuk-kelola-apbd-2024-secara-efisien-dan-berkelanjutan>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Penelitian

1. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Aceh	70,6	71,19	71,9	71,99	72,18	72,8	71,77667
Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72	72,71	71,66167
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26	72,275
Riau	71,79	72,44	73	72,71	72,94	73,52	72,73333
Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14	71,16
Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,9	69,90333
Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,4	71,64	72,16	71,16667
Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,9	70,45	69,48
Kep. Bangka Belitung	69,99	70,67	71,3	71,47	71,69	72,24	71,22667
Kep. Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46	75,435
Dki Jakarta	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65	80,80333
Jawa Barat	70,69	71,3	72,03	72,09	72,45	73,12	71,94667
Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	71,69833
Di Yogyakarta	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64	79,87333
Jawa Timur	70,27	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75	71,52333
Banten	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32	72,38333
Bali	74,3	74,77	75,38	75,5	75,69	76,44	75,34667
NTB	66,58	67,3	68,14	68,25	68,65	69,46	68,06333
NTT	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28	65,9	64,95333
Kalimantan Barat	66,26	66,98	67,65	67,66	67,9	68,63	67,51333
Kalimantan Tengah	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63	70,84167

Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84	70,76167
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44	76,35333
Kalimantan Utara	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83	70,86667
Sulawesi Utara	71,66	72,2	72,99	72,93	73,3	73,81	72,815
Sulawesi Tengah	68,11	68,88	69,5	69,55	69,79	70,28	69,35167
Sulawesi Selatan	70,34	70,9	71,66	71,93	72,24	72,82	71,64833
Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,2	71,45	71,66	72,23	71,16833
Gorontalo	67,01	67,71	68,49	68,68	69	69,81	68,45
Sulawesi Barat	64,3	65,1	65,73	66,11	66,36	66,92	65,75333
Maluku	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71	70,22	69,32167
Maluku Utara	67,2	67,76	68,7	68,49	68,76	69,47	68,39667
Papua Barat	62,99	63,74	64,7	65,09	65,26	65,89	64,61167
Papua	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39	60,40667
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	71,87667

2. Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur

Kab/Kota	Year	IPM	PP Pendidikan (Rupiah)	PP Kesehatan (Rupiah)	PE
Berau	2015	72.72	595.303.294.415,75	305.080.209.747,18	5.94
Berau	2016	73.05	117.624.419.947,49	51.746.365.978,00	-1.70
Berau	2017	73.56	400.330.123.521,00	288.105.064.535,32	3.01
Berau	2018	74.01	424.726.338.119,48	279.934.043.099,38	2.07
Berau	2019	74.88	520.923.831.576,87	332.117.281.447,12	5.63
Berau	2020	74.71	564.132.183.239,92	370.417.127.714,26	-3.32
Berau	2021	75.20	479.711.226.041,31	483.226.703.981,45	5.36
Berau	2022	75.74	427.273.818.940,00	249.514.272.355,00	3.95
Kartanegara	2015	71.78	1.854.896.928.502,54	931.198.853.306,14	-7.17

Kartanegara	2016	72.19	1.263.394.955.797,00	470.575.699.316,00	-1.97
Kartanegara	2017	72.75	1.153.167.485.840,74	608.435.394.671,68	1.63
Kartanegara	2018	73.15	1.185.208.279.267,62	626.281.545.151,15	2.16
Kartanegara	2019	73.78	1.275.973.241.830,03	694.881.227.535,43	3.92
Kartanegara	2020	73.59	1.233.299.120.170,84	747.822.165.797,10	-4.21
Kartanegara	2021	74.06	1.306.683.312.500,33	878.354.861.433,11	2.68
Kartanegara	2022	74.67	1.173.189.166.141,32	786.293.495.976,13	3.71
Kutai Barat	2015	69.34	267.765.890.566,37	182.309.913.251,03	-1.50
Kutai Barat	2016	69.99	229.817.378.388,00	173.816.857.742,89	-0.83
Kutai Barat	2017	70.18	205.596.142.625,78	166.891.628.240,98	3.64
Kutai Barat	2018	70.69	264.470.632.252,13	203.369.189.509,57	5.06
Kutai Barat	2019	71.63	300.320.771.350,57	240.481.403.336,34	5.69
Kutai Barat	2020	71.19	343.913.007.977,71	290.360.037.676,48	-2.87
Kutai Barat	2021	72.07	378.498.775.090,60	338.779.672.983,97	4.19
Kutai Barat	2022	72.92	403.103.772.177,00	270.756.806.750,00	4.77
Kutai Timur	2015	70.76	629.954.075.518,61	266.813.973.917,86	1.43
Kutai Timur	2016	71.10	183.592.987.710,00	59.384.500.362,00	-1.08
Kutai Timur	2017	71.91	439.204.251.671,92	216.642.421.324,80	3.28
Kutai Timur	2018	72.56	465.528.781.995,13	238.716.596.787,75	2.38
Kutai Timur	2019	73.49	671.695.368.515,77	316.796.643.215,95	8.17
Kutai Timur	2020	73.00	609.873.170.499,00	374.324.150.968,25	-3.08
Kutai Timur	2021	73.81	650.481.738.464,14	400.768.083.166,07	-0.89
Kutai Timur	2022	74.35	912.112.441.753,57	511.361.374.614,30	5.58
Paser	2015	70.30	502.430.409.714,40	298.555.278.956,97	-0.89
Paser	2016	71.00	429.468.764.925,00	217.926.862.613,28	-4.98
Paser	2017	71.16	436.999.009.750,62	242.078.872.111,76	1.17
Paser	2018	71.61	415.671.656.143,22	231.523.827.016,25	3.69
Paser	2019	72.29	468.523.777.069,40	272.879.364.891,40	3.99
Paser	2020	72.04	423.581.535.978,31	314.709.457.963,00	-2.86
Paser	2021	72.93	480.892.251.612,24	381.445.869.426,00	5.39
Paser	2022	73.44	460.249.232.961,00	228.595.488.971,00	1.09
Balikpapan	2015	78.18	808.905.642.049,51	316.431.358.426,31	1.19
Balikpapan	2016	78.57	699.756.118.725,21	256.609.533.676,66	4.92

Balikpapan	2017	79.01	590.606.595.400,90	196.787.708.927,00	3.84
Balikpapan	2018	79.81	543.245.386.922,50	245.721.041.595,85	4.97
Balikpapan	2019	80.11	626.040.043.654,61	281.021.953.217,48	4.99
Balikpapan	2020	80.01	564.587.591.343,35	283.058.658.882,50	-0.91
Balikpapan	2021	80.71	657.687.207.274,83	337.436.286.696,27	4.56
Balikpapan	2022	81.13	755.752.136.911,52	418.768.749.752,75	4.94
Bontang	2015	78.78	321.562.001.460,84	256.552.199.160,31	4.36
Bontang	2016	78.92	244.535.249.745,00	208.985.631.978,00	-1.39
Bontang	2017	79.47	194.494.092.562,00	198.567.967.797,00	0.55
Bontang	2018	79.86	247.061.451.118,00	226.995.790.135,00	-4.08
Bontang	2019	80.09	293.660.911.708,88	264.700.606.305,95	-2.15
Bontang	2020	80.02	229.563.441.353,05	288.697.794.364,79	-2.74
Bontang	2021	80.59	282.771.176.431,00	311.093.189.992,28	1.60
Bontang	2022	80.94	273.366.507.265,00	300.111.333.662,28	2.46
Samarinda	2015	78.69	942.214.761.869,62	323.778.714.067,87	0.04
Samarinda	2016	78.91	740.384.548.913,75	256.262.052.715,57	0.56
Samarinda	2017	79.46	674.130.832.965,44	306.137.990.831,27	3.85
Samarinda	2018	79.93	660.312.278.864,95	326.352.167.427,10	4.96
Samarinda	2019	80.20	721.917.289.008,34	359.339.687.858,30	5.00
Samarinda	2020	80.11	654.915.740.454,00	326.253.601.442,47	-0.99
Samarinda	2021	80.76	671.663.819.902,03	426.566.355.242,72	2.78
Samarinda	2022	81.43	581.831.678.569,93	363.427.733.659,26	6.58
Penajam Paser Utara	2015	69.26	248.213.802.611,41	146.602.990.881,00	0.14
Penajam Paser Utara	2016	69.96	250.529.826.462,08	147.416.003.990,50	-0.47
Penajam Paser Utara	2017	70.59	252.845.850.312,76	148.229.017.100,00	2.44
Penajam Paser Utara	2018	71.13	154.988.077.410,00	78.820.464.141,00	1.28
Penajam Paser Utara	2019	71.64	294.466.569.313,24	210.150.065.836,00	2.61

Penajam Paser Utara	2020	71.41	321.879.240.436,71	214.092.657.241,00	-2.34
Penajam Paser Utara	2021	72.01	269.909.626.487,48	225.936.770.139,60	-1.69
Penajam Paser Utara	2022	72.55	273.598.545.623,02	216.653.566.505,60	14.49
Mahakam Ulu	2015	64.89	132.841.353.270,15	113.047.325.690,81	3.32
Mahakam Ulu	2016	65.51	129.689.435.798,58	115.674.804.797,40	3.41
Mahakam Ulu	2017	66.09	126.537.518.327,00	118.302.283.904,00	4.29
Mahakam Ulu	2018	66.67	122.227.215.888,00	104.477.785.531,00	5.40
Mahakam Ulu	2019	67.58	141.320.769.507,51	153.801.354.504,83	5.52
Mahakam Ulu	2020	67.09	202.055.574.515,06	147.716.314.170,00	-0.22
Mahakam Ulu	2021	67.95	172.644.697.313,00	111.205.876.258,00	1.27
Mahakam Ulu	2022	68.75	148.925.919.047,00	133.322.914.427,72	0.91

3. Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua

Kab/Kota	Year	IPM	PP Pendidikan (Rupiah)	PP Kesehatan (Rupiah)	PE
Biak Numfor	2016	71.13	154.444.485.804,00	119.340.330.129,00	4.06
Biak Numfor	2017	71.56	179.858.530.054,00	113.813.733.324,00	-4.57
Biak Numfor	2018	71.96	177.582.123.153,88	158.140.051.456,00	0.42
Biak Numfor	2019	72.57	221.373.292.518,00	310.957.773.019,59	2.21
Biak Numfor	2020	72.19	200.370.429.001,00	311.566.992.151,84	-5.06
Biak Numfor	2021	72.33	184.641.820.428,00	283.606.209.903,84	2.48
Biak Numfor	2022	72.85	203.898.961.632,00	182.520.118.267,00	4.98
Jayapura	2016	70.50	220.369.715.427,00	139.412.675.611,44	8.54
Jayapura	2017	70.97	224.630.589.389,00	146.105.343.012,00	7.01
Jayapura	2018	71.25	208.236.070.986,00	165.864.607.039,79	7.69
Jayapura	2019	71.84	273.820.215.200,48	166.140.077.303,34	7.16
Jayapura	2020	71.69	287.915.795.666,99	191.574.947.523,00	-2.50
Jayapura	2021	72.03	239.921.766.080,71	215.862.942.547,50	4.90
Jayapura	2022	72.67	223.992.800.533,00	159.230.225.431,00	3.74

Jayawijaya	2016	54.96	77.099.507.895,00	157.977.101.617,00	4.67
Jayawijaya	2017	55.99	87.285.837.936,00	165.819.302.079,69	5.51
Jayawijaya	2018	56.82	96.772.963.559,00	253.845.643.434,76	6.34
Jayawijaya	2019	57.79	113.266.439.953,00	186.194.456.022,48	4.97
Jayawijaya	2020	58.03	88.973.228.651,00	134.617.126.096,22	-3.24
Jayawijaya	2021	58.67	168.678.003.519,00	225.880.867.727,00	1.26
Jayawijaya	2022	59.60	180.611.627.673,00	327.471.963.407,00	5.70
Merauke	2016	54.96	75.276.385.729,00	62.272.724.458,00	7.66
Merauke	2017	68.64	371.204.950.076,00	327.895.664.778,90	7.46
Merauke	2018	69.38	376.871.389.267,00	350.230.595.363,00	8.11
Merauke	2019	69.98	423.144.908.682,00	385.325.550.459,47	7.55
Merauke	2020	70.09	442.783.332.883,00	383.463.964.698,92	-0.95
Merauke	2021	70.49	301.209.351.744,00	341.035.772.397,28	1.51
Merauke	2022	71.24	352.218.789.676,00	366.092.332.626,00	4.58
Mimika	2016	71.64	114.338.690.298,00	138.584.045.122,00	13.51
Mimika	2017	72.42	380.428.805.836,00	276.764.515.583,36	3.69
Mimika	2018	73.15	306.786.214.607,00	403.447.942.121,34	10.27
Mimika	2019	74.13	328.196.705.712,10	364.669.592.242,88	-38.52
Mimika	2020	74.19	402.434.499.299,00	408.155.388.842,75	11.44
Mimika	2021	74.48	369.660.326.241,98	582.227.929.101,27	36.85
Mimika	2022	75.08	553.213.470.996,00	585.503.821.924,51	15.31
Nabire	2016	66.64	231.558.066.333,00	176.480.076.994,00	6.79
Nabire	2017	67.11	196.292.904.498,00	194.595.309.886,00	6.10
Nabire	2018	67.70	206.249.936.772,00	254.497.874.648,00	5.76
Nabire	2019	68.53	178.577.880.243,00	238.290.439.659,00	4.66
Nabire	2020	68.83	175.607.326.819,00	235.394.367.131,05	-1.36
Nabire	2021	69.15	211.138.233.905,00	244.332.476.906,00	4.47
Nabire	2022	69.91	71.510.811.805,00	154.299.667.350,00	2.57
Paniai	2016	54.34	110.304.907.324,45	172.013.252.333,82	6.73
Paniai	2017	54.91	117.893.204.992,00	198.933.959.335,00	4.76
Paniai	2018	55.83	116.369.640.561,00	205.705.366.791,00	6.49
Paniai	2019	56.58	115.530.897.590,64	168.231.287.897,14	3.84
Paniai	2020	56.31	152.653.420.319,68	205.017.161.181,62	0.46

Paniai	2021	56.70	164.088.067.862,04	247.170.867.257,92	1.65
Paniai	2022	57.14	193.974.288.499,00	198.635.433.291,00	3.56
Puncak Jaya	2016	45.49	98.601.029.936,00	159.357.337.809,00	4.60
Puncak Jaya	2017	46.57	98.959.535.419,00	79.954.885.344,00	3.73
Puncak Jaya	2018	47.39	107.795.913.878,00	167.089.598.172,25	4.52
Puncak Jaya	2019	48.33	76.242.804.464,00	104.511.765.598,00	4.09
Puncak Jaya	2020	48.37	64.202.444.064,00	135.412.181.808,00	-4.04
Puncak Jaya	2021	48.99	80.384.159.099,00	118.359.757.229,00	1.41
Puncak Jaya	2022	49.84	93.522.542.311,00	160.333.417.815,00	2.95
Kep. Yapen	2016	65.55	227.199.050.157,56	154.758.818.714,20	5.41
Kep. Yapen	2017	66.07	241.923.721.938,00	166.180.416.822,00	4.64
Kep. Yapen	2018	67.00	212.265.902.543,00	164.985.594.241,00	4.55
Kep. Yapen	2019	67.76	203.106.910.197,00	151.578.965.886,00	4.73
Kep. Yapen	2020	67.66	189.030.501.799,00	190.832.016.684,00	-4.53
Kep. Yapen	2021	67.72	191.912.044.998,84	186.684.570.478,34	4.79
Kep. Yapen	2022	68.41	181.433.190.582,97	187.539.264.234,00	3.96
Kota Jayapura	2016	78.56	356.641.402.182,00	76.656.134.175,00	7.23
Kota Jayapura	2017	79.23	349.138.383.688,00	99.832.121.066,85	6.02
Kota Jayapura	2018	79.58	272.929.926.791,00	118.613.060.121,50	5.45
Kota Jayapura	2019	80.16	314.672.241.905,40	123.901.131.547,00	4.95
Kota Jayapura	2020	79.94	291.341.304.046,00	162.609.895.055,00	-3.24
Kota Jayapura	2021	80.11	316.547.997.716,93	151.568.832.873,00	3.17
Kota Jayapura	2022	80.61	365.844.568.867,30	139.172.188.929,25	3.87
Sarmi	2016	61.27	13.433.406.990,00	46.630.234.566,00	6.71
Sarmi	2017	62.31	107.348.747.828,00	112.178.322.535,00	7.10
Sarmi	2018	63.00	111.521.157.724,00	77.611.845.317,00	6.24
Sarmi	2019	63.45	111.315.277.610,05	92.667.789.344,00	5.86
Sarmi	2020	63.63	114.787.729.136,00	137.594.784.091,99	0.03
Sarmi	2021	63.94	128.157.005.592,00	111.160.996.740,36	1.68
Sarmi	2022	64.86	159.634.791.971,00	81.068.980.523,00	2.15
Keerom	2016	64.10	29.889.448.352,00	11.306.076.555,00	5.79
Keerom	2017	64.99	143.699.779.272,00	76.658.374.535,00	4.85
Keerom	2018	65.75	159.308.486.110,00	128.455.584.073,00	4.19

Keerom	2019	66.59	151.157.686.483,00	145.264.262.511,00	3.90
Keerom	2020	66.40	116.916.741.868,00	107.099.362.440,00	0.13
Keerom	2021	66.49	146.433.936.099,00	102.024.291.348,85	2.71
Keerom	2022	67.24	150.805.344.273,00	105.318.771.353,96	2.88
Yahukimo	2016	47.13	115.809.411.053,00	124.179.479.621,00	4.61
Yahukimo	2017	47.95	156.008.546.355,00	179.924.500.256,00	6.05
Yahukimo	2018	48.51	147.074.391.428,34	191.318.637.739,00	5.47
Yahukimo	2019	49.25	209.821.145.040,00	199.544.145.721,42	4.98
Yahukimo	2020	49.37	165.450.540.757,27	140.807.864.150,00	0.02
Yahukimo	2021	49.48	192.277.672.466,00	232.796.210.098,00	1.90
Yahukimo	2022	50.25	248.061.071.722,12	196.765.669.570,00	1.70
Pegunungan Bintang	2016	41.90	109.263.127.804,00	72.046.570.867,00	6.49
Pegunungan Bintang	2017	43.24	134.090.575.692,00	171.601.998.686,00	6.05
Pegunungan Bintang	2018	44.22	113.460.762.891,00	216.431.921.784,00	5.20
Pegunungan Bintang	2019	45.21	127.812.558.256,00	207.500.172.794,00	4.74
Pegunungan Bintang	2020	45.44	150.698.745.895,00	275.949.136.993,00	-0.10
Pegunungan Bintang	2021	46.28	161.259.721.047,80	184.202.194.779,00	2.56
Pegunungan Bintang	2022	47.21	132.532.036.404,00	194.657.509.287,00	3.32
Tolikara	2016	47.11	62.909.310.726,00	167.861.618.152,00	4.58
Tolikara	2017	47.89	104.524.422.928,00	133.311.730.616,00	4.60
Tolikara	2018	48.85	109.060.245.058,00	217.913.823.679,00	4.52
Tolikara	2019	49.68	116.068.063.048,00	143.035.778.509,00	3.92
Tolikara	2020	49.50	107.809.889.300,00	191.812.577.420,00	0.50
Tolikara	2021	49.60	241.400.767.384,00	133.569.867.128,00	0.96
Tolikara	2022	50.51	167.534.805.991,00	177.891.562.531,00	4.08
Boven Digoel	2016	59.35	118.429.653.030,00	115.973.483.998,00	4.74

Boven Digoel	2017	60.14	120.969.257.816,00	155.406.300.145,00	4.07
Boven Digoel	2018	60.83	119.326.003.019,00	130.004.141.054,00	3.26
Boven Digoel	2019	61.51	150.684.494.005,00	188.382.041.300,00	1.66
Boven Digoel	2020	61.53	156.298.984.034,63	205.932.487.085,12	-2.60
Boven Digoel	2021	61.62	153.579.164.577,08	190.315.561.552,00	0.74
Boven Digoel	2022	62.52	105.166.687.418,01	161.011.780.494,42	1.55
Mappi	2016	56.54	164.264.119.334,00	116.326.904.503,00	6.92
Mappi	2017	57.10	185.533.583.359,00	148.883.478.463,00	7.03
Mappi	2018	57.72	206.653.617.606,00	169.251.256.757,84	6.31
Mappi	2019	58.30	226.714.050.137,00	173.338.298.442,00	6.11
Mappi	2020	58.15	245.184.547.764,00	183.789.721.140,60	-1.26
Mappi	2021	58.70	205.936.445.079,00	221.115.982.121,05	2.23
Mappi	2022	59.61	199.216.773.303,00	244.293.337.224,00	5.00
Asmat	2016	47.31	137.709.017.379,00	118.406.228.061,00	6.18
Asmat	2017	48.49	199.565.491.549,00	194.921.482.639,00	5.85
Asmat	2018	49.37	226.341.848.729,00	236.189.361.501,00	5.77
Asmat	2019	50.37	208.922.783.202,00	228.238.972.739,72	4.79
Asmat	2020	50.55	189.792.764.857,00	229.830.269.243,65	0.59
Asmat	2021	51.29	213.983.695.785,00	234.103.304.744,04	2.11
Asmat	2022	52.22	251.984.388.677,33	240.248.311.415,16	4.99
Waropen	2016	63.10	111.973.318.099,00	65.779.193.877,00	9.46
Waropen	2017	64.08	95.243.975.359,00	96.136.688.345,00	7.72
Waropen	2018	64.80	124.772.679.093,00	66.862.727.852,00	7.18
Waropen	2019	65.34	64.396.972.581,00	62.527.231.275,00	5.43
Waropen	2020	64.94	69.037.268.231,00	81.576.932.475,00	-2.82
Waropen	2021	65.10	106.895.016.589,61	76.787.329.698,01	1.35
Waropen	2022	65.67	104.453.639.778,00	74.084.167.251,00	4.72
Supiori	2016	60.59	11.028.809.200,00	21.370.490.094,00	4.43
Supiori	2017	61.23	77.087.968.454,00	79.193.026.231,00	4.01
Supiori	2018	61.84	90.294.191.841,00	77.411.749.808,00	4.17
Supiori	2019	62.30	80.932.192.300,00	89.596.876.093,45	4.33
Supiori	2020	62.30	72.292.948.496,00	85.429.817.438,00	1.07
Supiori	2021	62.72	109.265.073.614,00	90.968.135.807,00	1.57

Supiori	2022	63.65	91.439.901.027,00	67.727.324.688,33	2.94
Mamberamo Raya	2016	49.00	72.591.043.661,00	65.400.492.403,00	8.08
Mamberamo Raya	2017	50.25	123.563.687.599,00	124.497.100.755,00	6.45
Mamberamo Raya	2018	51.24	122.259.626.866,00	120.991.474.309,00	5.90
Mamberamo Raya	2019	52.20	125.804.276.646,00	181.385.564.443,00	5.88
Mamberamo Raya	2020	51.78	129.418.631.382,00	164.050.018.069,00	0.32
Mamberamo Raya	2021	52.18	86.080.034.139,00	137.048.587.379,06	1.33
Mamberamo Raya	2022	53.10	94.015.995.269,57	96.707.218.890,00	3.10
Mamberamo Tengah	2016	44.15	35.228.304.259,00	50.340.126.803,00	5.72
Mamberamo Tengah	2017	45.50	82.077.588.860,00	128.196.957.170,00	5.66
Mamberamo Tengah	2018	46.41	145.893.135.208,00	59.735.878.024,00	5.11
Mamberamo Tengah	2019	47.23	61.063.079.778,00	70.234.386.221,00	4.94
Mamberamo Tengah	2020	47.57	70.693.960.631,00	108.223.896.796,00	0.96
Mamberamo Tengah	2021	48.32	82.049.233.570,00	77.986.892.098,00	1.48
Mamberamo Tengah	2022	49.25	85.205.818.108,00	61.943.350.843,00	0.90
Yalimo	2016	44.95	115.973.500.851,00	103.186.032.602,00	6.83
Yalimo	2017	46.19	99.724.273.999,00	85.273.602.628,00	5.19
Yalimo	2018	47.13	68.487.194.745,00	114.978.868.942,00	6.49
Yalimo	2019	48.08	95.952.131.922,00	148.677.756.879,00	5.49
Yalimo	2020	48.34	118.230.246.924,00	111.112.417.437,00	0.98

Yalimo	2021	49.01	97.926.057.741,00	83.935.310.633,00	2.29
Yalimo	2022	49.90	79.339.999.297,00	52.027.483.746,00	4.86
Lanny Jaya	2016	45.16	111.479.246.594,00	148.113.645.593,00	5.81
Lanny Jaya	2017	46.49	123.683.070.761,00	116.248.304.642,00	5.39
Lanny Jaya	2018	47.34	140.479.817.533,00	176.150.723.584,00	5.27
Lanny Jaya	2019	48.00	122.003.720.863,00	117.862.455.131,00	5.16
Lanny Jaya	2020	47.86	114.324.160.974,00	120.485.385.544,00	1.78
Lanny Jaya	2021	48.68	150.334.602.668,00	93.307.235.381,00	1.82
Lanny Jaya	2022	49.62	162.488.330.734,00	242.783.996.238,00	4.00
Nduga	2016	26.56	84.166.713.853,00	46.744.157.519,00	6.73
Nduga	2017	27.87	89.636.039.180,00	44.927.306.552,00	7.25
Nduga	2018	29.42	106.431.568.222,00	136.131.954.570,00	5.74
Nduga	2019	30.75	141.218.072.832,00	91.493.649.427,00	4.84
Nduga	2020	31.55	122.213.916.937,00	56.576.210.644,00	0.69
Nduga	2021	32.84	76.531.784.619,00	81.633.057.556,00	2.71
Nduga	2022	34.10	53.949.366.430,00	163.077.224.402,00	3.05
Dogiyai	2016	53.32	119.955.445.201,00	79.673.802.265,00	6.90
Dogiyai	2017	54.04	112.670.544.040,50	4.565.783.563,00	5.88
Dogiyai	2018	54.44	105.385.642.880,00	152.639.783.190,00	5.86
Dogiyai	2019	55.41	137.106.350.305,00	94.382.100.168,00	5.73
Dogiyai	2020	54.84	171.513.171.199,00	97.861.638.976,00	0.34
Dogiyai	2021	55.00	131.841.768.404,00	105.044.738.170,00	1.22
Dogiyai	2022	55.72	161.437.171.006,00	116.282.066.058,00	0.78
Puncak	2016	39.96	23.671.940.360,00	35.690.107.402,00	7.32
Puncak	2017	41.06	71.683.109.325,34	114.776.108.034,00	6.67
Puncak	2018	41.81	67.942.346.531,00	136.102.572.823,00	6.72
Puncak	2019	42.70	77.601.467.265,00	144.788.532.156,98	4.80
Puncak	2020	43.04	60.164.639.240,00	78.917.086.186,00	0.08
Puncak	2021	43.17	75.464.516.897,00	85.379.522.624,00	0.72
Puncak	2022	43.87	78.316.388.975,00	210.813.939.514,45	3.81
Intan Jaya	2016	44.82	86.719.591.921,11	71.411.641.165,43	7.17
Intan Jaya	2017	45.68	84.302.285.213,00	71.660.200.894,00	3.66
Intan Jaya	2018	46.55	89.667.907.111,00	102.117.733.347,00	2.79

Intan Jaya	2019	47.51	99.551.415.458,73	89.176.789.496,00	2.72
Intan Jaya	2020	47.79	82.456.766.088,14	83.798.992.160,95	-0.38
Intan Jaya	2021	48.34	113.350.250.520,33	147.470.815.611,54	1.07
Intan Jaya	2022	49.25	108.718.204.932,59	91.402.699.021,87	2.64
Deiyai	2016	48.50	29.512.872.430,00	31.797.692.974,00	7.91
Deiyai	2017	49.07	82.807.382.738,00	73.661.658.639,00	4.80
Deiyai	2018	49.55	93.390.780.630,00	86.968.641.749,00	3.43
Deiyai	2019	50.11	84.519.719.453,00	69.625.943.895,00	3.74
Deiyai	2020	49.46	99.905.375.175,00	79.635.487.787,20	-0.35
Deiyai	2021	49.96	125.031.207.900,00	105.756.114.259,60	1.26
Deiyai	2022	50.42	92.335.685.715,00	116.496.839.379,00	3.81

Lampiran 2

Hasil Regresi Data Panel

1. Hasil analisis data Provinsi Kalimantan Timur

Common Effect Model

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/16/24 Time: 21:29

Sample: 2015 2022

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.23724	21.47866	-0.523182	0.6024
LOG(PPPEND)	2.256259	1.467661	1.537316	0.1284
LOG(PPKES)	0.941768	1.735449	0.542665	0.5889
PE	0.078478	0.128678	0.609878	0.5438
R-squared	0.199854	Mean dependent var	74.02963	
Adjusted R-squared	0.168269	S.D. dependent var	4.364396	
S.E. of regression	3.980297	Akaike info criterion	5.649297	
Sum squared resid	1204.050	Schwarz criterion	5.768398	
Log likelihood	-221.9719	Hannan-Quinn criter.	5.697048	
F-statistic	6.327557	Durbin-Watson stat	0.119057	
Prob(F-statistic)	0.000689			

Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/16/24 Time: 21:33

Sample: 2015 2022

Periods included: 8

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.34529	10.67334	5.560145	0.0000
LOG(PPPEND)	-2.128614	0.779369	-2.731202	0.0081
LOG(PPKES)	2.720714	0.592817	4.589463	0.0000
PE	0.065727	0.030898	2.127235	0.0371

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.966336	Mean dependent var	74.02963
Adjusted R-squared	0.960306	S.D. dependent var	4.364396
S.E. of regression	0.869529	Akaike info criterion	2.705935
Sum squared resid	50.65735	Schwarz criterion	3.093014
Log likelihood	-95.23739	Hannan-Quinn criter.	2.861126
F-statistic	160.2709	Durbin-Watson stat	1.001435
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/16/24 Time: 21:36
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 80
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.79107	10.62256	5.346268	0.0000
LOG(PPPEND)	-1.943107	0.767226	-2.532640	0.0134
LOG(PPKES)	2.629034	0.588186	4.469730	0.0000
PE	0.066104	0.030878	2.140814	0.0355
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.765927	0.9678
Idiosyncratic random			0.869529	0.0322
Weighted Statistics				
R-squared	0.345274	Mean dependent var		4.765356
Adjusted R-squared	0.319429	S.D. dependent var		1.047380
S.E. of regression	0.864054	Sum squared resid		56.74076
F-statistic	13.35969	Durbin-Watson stat		0.905539
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.001161	Mean dependent var		74.02963
Sum squared resid	1506.534	Durbin-Watson stat		0.034105

2. Hasil analisis data Provinsi Papua

Common Effect Model

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/16/24 Time: 21:45
 Sample: 2016 2022
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 203

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-200.6943	32.13801	-6.244765	0.0000
LOG(PPPEND)	11.96887	1.580093	7.574789	0.0000
LOG(PPKES)	-1.909219	1.493571	-1.278291	0.2026
PE	-0.027726	0.138959	-0.199524	0.8421
R-squared	0.294948	Mean dependent var	56.78414	
Adjusted R-squared	0.284320	S.D. dependent var	11.28243	
S.E. of regression	9.544702	Akaike info criterion	7.369357	
Sum squared resid	18129.17	Schwarz criterion	7.434642	
Log likelihood	-743.9898	Hannan-Quinn criter.	7.395769	
F-statistic	27.74962	Durbin-Watson stat	0.191774	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/16/24 Time: 21:47
 Sample: 2016 2022
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 203

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.918921	7.839409	-0.499900	0.6178
LOG(PPPEND)	1.111517	0.348822	3.186483	0.0017
LOG(PPKES)	1.267638	0.295340	4.292136	0.0000
PE	-0.057177	0.021152	-2.703149	0.0076

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986910	Mean dependent var	56.78414
Adjusted R-squared	0.984537	S.D. dependent var	11.28243
S.E. of regression	1.402962	Akaike info criterion	3.658776
Sum squared resid	336.5795	Schwarz criterion	4.181055
Log likelihood	-339.3658	Hannan-Quinn criter.	3.870070
F-statistic	415.8927	Durbin-Watson stat	1.015811
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/16/24 Time: 21:48
 Sample: 2016 2022
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 203
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.933290	7.989654	-0.742622	0.4586
LOG(PPPEND)	1.206189	0.347986	3.466197	0.0006
LOG(PPKES)	1.251529	0.294919	4.243639	0.0000
PE	-0.056482	0.021148	-2.670764	0.0082

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		8.946109	0.9760
Idiosyncratic random		1.402962	0.0240

Weighted Statistics			
R-squared	0.275642	Mean dependent var	3.359913
Adjusted R-squared	0.264722	S.D. dependent var	1.688751
S.E. of regression	1.448077	Sum squared resid	417.2882
F-statistic	25.24199	Durbin-Watson stat	0.823436
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.092295	Mean dependent var	56.78414
Sum squared resid	23340.05	Durbin-Watson stat	0.014722

3. Hasil pemilihan model terbaik Provinsi Kalimantan Timur

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	169.498969	(9,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	253.468955	9	0.0000

Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	236.4009 (0.0000)	1.644642 (0.1997)	238.0455 (0.0000)
Honda	15.37533 (0.0000)	-1.282436 (0.9002)	9.965184 (0.0000)
King-Wu	15.37533 (0.0000)	-1.282436 (0.9002)	9.208001 (0.0000)
Standardized Honda	17.71451 (0.0000)	-1.014792 (0.8449)	8.649494 (0.0000)
Standardized King-Wu	17.71451 (0.0000)	-1.014792 (0.8449)	7.781131 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	236.4009 (0.0000)

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.045988	3	0.5629

5. Hasil pemilihan model terbaik Provinsi Papua

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	322.841595	(28,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	809.247905	28	0.0000

Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	437.1665 (0.0000)	1.450194 (0.2285)	438.6167 (0.0000)
Honda	20.90853 (0.0000)	-1.204240 (0.8858)	13.93304 (0.0000)
King-Wu	20.90853 (0.0000)	-1.204240 (0.8858)	7.690508 (0.0000)
Standardized Honda	21.78562 (0.0000)	-0.973042 (0.8347)	11.16655 (0.0000)
Standardized King-Wu	21.78562 (0.0000)	-0.973042 (0.8347)	5.251872 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	437.1665 (0.0000)

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.004252	3	0.0011